

SKRIPSI

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA KEUANGAN DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO (DTKKUM) KOTA TANJUNGPINANG

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam
Riau*



OLEH :

**HUSWATUL LIANA
NPM : 175310874**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dengan tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang tahun 2018-2019 yang ditinjau dari elemen ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Dimana data primer bersumber dari informasi yang diperoleh langsung di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang. Data sekunder seperti literatur, jurnal, skripsi, dan buku. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang tahun 2018-2019 belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *value for money*. Hal ini dapat ditinjau dari pengukuran ekonomi yang telah mencapai hasil cukup ekonomis. Pengukuran efisiensi kegiatan yang terlaksanakan hasil yang dicapai efisien dan pengukuran efektivitas telah mencapai hasil cukup efektif namun terdapat dua kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga hasil capaian tidak efisien dan tidak efektif.

Kata Kunci : *Value for Money* dan Kinerja Keuangan

ABSTRACT

This research was conducted at the Department of Cooperative Labor and Micro Enterprise of Tanjungpinang City with the aim to know the financial performance of the Department of Cooperative Labor and Micro Enterprise of Tanjungpinang City in 2018-2019 which is reviewed from the economic, efficiency and effectiveness elements.

The research design used is a qualitative descriptive approach. Data sources obtained from primary and secondary data. Where the primary data is the source of information obtained directly at the Department of Cooperative Labor and Micro Enterprise Tanjungpinang City. Secondary data such as literature, journals, theses, and books. Data collection techniques are documentation, literature study.

The results of this study showed the performance of the Department of Cooperative Labor and Micro Enterprise of Tanjungpinang City in 2018-2019 2019 has not been fully in accordance with the principle of value *for money*. This can be reviewed from economic measurements that have achieved quite economical results. Measurement of efficiency of activities carried out efficiently and effectiveness measurement has achieved quite effective results but there are two activities that are not carried out so that the results of achievements are inefficient and ineffective.

Keywords : Value for Money and Financial Performance

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Value for Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang**”, guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kesalahan, hambatan serta kekurangan dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dalam tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada banyak pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi yang telah memberikan dukungan, bimbingan, motivasi serta do'a kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, moril ataupun materil. Ucapan terima kasih ini penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM. CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA selaku Pembimbing yang telah memberikan masukan, membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah memberikan banyak ilmu serta kemudahan dalam urusan akademis selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Keluarga Besar Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang yang telah memberikan pelayanan serta mempermudah penulis untuk memperoleh data-data dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk Kedua Orang Tua Penulis Ayahanda M. Zubir dan Ibunda Arnani serta Abangku Mardiansyah Saputra dan Adekku Ilham Maulidi yang telah merawat penulis atas segala curahan kasih sayang, doa serta dukungan yang tak terhingga demi kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan dan seperantauan terimakasih sudah menjadi teman terbaik dan mensupport penulis selama ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu dalam memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada kita semua. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.

Pekanbaru, 05 November 2021

Penulis,

Huswatul Liana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN	
PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	15
2.1 Telaah Pustaka	15
2.1.1 Pengukuran Kinerja.....	15
2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja	16
2.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja	16
2.1.4 Kelebihan Dalam Pengukuran Kinerja.....	17
2.1.5 Elemen Pokok Pengukuran Kinerja	18
2.1.6 Akuntansi Sektor Publik	20
2.1.7 Tujuan Akuntansi Sektor Publik	21
2.1.8 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik	21
2.1.9 Karakteristik Lingkungan Akuntansi Sektor Publik	22
2.1.10 Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	26
2.1.11 Aspek-aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik	27
2.1.12 <i>Value For Money</i>	28
2.1.13 Indikator <i>Value For Money</i>	29
2.1.14 Tujuan <i>Value For Money</i>	30
2.1.15 Konsep Pengukuran Kinerja <i>Value For Money</i>	31
2.2 Penelitian Terdahulu	34

2.3 Hipotesis.....	36
BAB III. METODE PENELITIAN	37
3.1 Desain Penelitian.....	37
3.2 Objek Penelitian	37
3.3 Jenis dan Sumber Data	38
3.3.1 Data Primer	38
3.3.2 Data Sekunder	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.4.2 Dokumentasi	39
3.4.3 Studi Kepustakaan.....	39
3.5 Teknik Analisis Data.....	39
3.5.1 <i>Collecting</i> /Pengumpulan Data	39
3.5.2 Reduksi Data	40
3.5.3 Penyajian Data	40
3.5.4 Penarikan Kesimpulan	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	42
4.1.1 Profil Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.....	42
4.1.3 Struktur Organisasi	43
4.1.4 Tugas Pokok dan Tanggungjawab	46
4.2 Hasil Penelitian	71
4.3 Pembahasan.....	88
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Belanja Langsung DTKKUM	6
Tabel 1.2 Realisasi dan Anggaran Program/Kegiatan 2018	6
Tabel 1.3 Realisasi dan Anggaran Program/Kegiatan 2019	8
Tabel 1.4 Realisasi dan Anggaran Program/Kegiatan 2018-2019	10
Tabel 2.1 Kriteria Pengukuran Ekonomi	32
Tabel 2.2 Kriteria Pengukuran Efisien	33
Tabel 2.3 Kriteria Pengukuran Efektif	34
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Belanja Modal 2018-2019	72
Tabel 4.2 Pengukuran Ekonomi Realisasi Anggaran Belanja Modal 2018-2019	73
Tabel 4.3 Pengukuran Ekonomi Program/Kegiatan 2018.....	73
Tabel 4.4 Pengukuran Ekonomi Program/Kegiatan 2019.....	75
Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Ekonomi 2018	77
Tabel 4.6 Hasil Pengukuran Ekonomi 2019	77
Tabel 4.7 Perbandingan Hasil Pengukuran Ekonomi 2018-2019	77
Tabel 4.8 Realisasi Anggaran Belanja Operasional 2018-2019.....	78
Tabel 4.9 Pengukuran Efisien Realisasi Anggaran Belanja Operasional 2018-2019	79
Tabel 4.10 Pengukuran Efisien Program/Kegiatan 2018.....	79
Tabel 4.11 Pengukuran Efisien Program/Kegiatan 2019.....	80
Tabel 4.12 Hasil Pengukuran Efisien 2018.....	82
Tabel 4.13 Hasil Pengukuran Efisien 2019.....	82
Tabel 4.14 Perbandingan Hasil Pengukuran Efisien 2018-2019	83
Tabel 4.15 Pengukuran Efektivitas Program/Kegiatan 2018.....	84
Tabel 4.16 Pengukuran Efektivitas Program/Kegiatan 2019.....	85
Tabel 4.17 Hasil Pengukuran Efektivitas 2018.....	87
Tabel 4.18 Hasil Pengukuran Efektivitas 2019.....	87
Tabel 4.19 Perbandingan Hasil Pengukuran Efektivitas 2018-2019	88
Tabel 4.20 Hasil Rekap Pengukuran VFM DTKKUM 2018-2019	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi DTKKUM 45



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan DTKKUM Tahun 2018-2019.
- Lampiran 2. Rencana, Program Kegiatan Pendanaan DTKKUM Tahun 2018-2019.
- Lampiran 3. Hasil Capaian Kinerja DTKKUM Tahun 2018-2019.
- Lampiran 4. Capaian Kinerja DTKKUM Tahun 2018.
- Lampiran 5. Capaian Kinerja DTKKUM Tahun 2019.
- Lampiran 6. Realisasi Penyerapan Anggaran DTKKUM.
- Lampiran 7. Laporan Realisasi Anggaran DTKKUM Tahun 2018.
- Lampiran 8. Laporan Realisasi Anggaran DTKKUM Tahun 2019.
- Lampiran 9. Perjanjian dan Pengukuran Kinerja DTKKUM Tahun 2018.
- Lampiran 10. Perjanjian dan Pengukuran Kinerja DTKKUM Tahun 2019.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah merupakan salah satu penyelenggara untuk mengendalikan seluruh aktivitas pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat di suatu daerah. Pemerintah daerah berwenang untuk mengendalikan dan mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian otonomi yang luas dalam suatu daerah, pemerintah dituntut untuk melaksanakan roda pemerintahan secara transparan, ekonomis, efektif, efisien, serta bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan mempercepat terwujudnya peningkatan daya saing dan memcermati prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta potensi yang ada disuatu daerah. Unsur penting pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah adalah dengan cara pengelolaan keuangan daerah guna menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas pembangunan.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Setiap daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat. Termasuk pada pengelolaan keuangan di daerah kabupaten dan kota yang diurus sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Kinerja keuangan jadi isu yang sangat penting untuk dikaji dan diterapkan dalam penganggaran berbasis kinerja, serta dituntut untuk mampu dalam menghasilkan ukuran kinerja keuangan pemerintah secara baik. Meningkatnya tuntutan terhadap penerapan akuntabilitas publik pada organisasi sektor publik, yakni pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah serta lembaga negara, diharapkan bisa mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan menemukan program-program yang tidak layak secara ekonomi. Hal ini, dapat dianalisis melalui ukuran kinerja yang sudah disusun dengan tidak hanya memakai satu ukuran. Tetapi, perlu memakai ukuran yang berbeda untuk menghasilkan tujuan yang berbeda. Selain itu, membandingkan hasil yang sudah dicapai pada suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga bisa diketahui bagaimana kecenderungan atas kinerja keuangan yang sudah terjadi.

Keberhasilan instansi dalam mensukseskan serta mewujudkan pembangunan nasional didukung oleh sebagian aspek yaitu, pada sistem pelaporan keuangan instansi dan kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini, pengukuran kinerja sangat dibutuhkan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan sesuai target. Hasil pengukurannya wajib dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja. Evaluasi dalam pertanggungjawaban suatu instansi pemerintahan bisa dilihat pada kinerja keuangannya melalui perhitungan serta analisis terhadap pencapaian target pada

realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) baik dilihat dari sisi kinerjanya maupun keuangannya.

Pengukuran kinerja pada instansi pemerintah dilaksanakan untuk memenuhi tiga unsur. Pertama, membantu dalam memperbaiki kinerja pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam berfokus pada tujuan dan target yang sesuai terhadap program unit kerja. Sehingga, bisa meningkatkan efisiensi serta efektivitas organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja akan digunakan untuk mengalokasikan sumber daya serta membantu dalam pengambilan keputusan. Ketiga, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan meningkatkan komunikasi antar kelembagaan. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, maupun akuntabel dapat diukur dengan menggunakan pendekatan *value for money*.

Value for money ialah inti dalam mengevaluasi kinerja yang terjadi pada instansi pemerintah, didasarkan pada tiga unsur utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Menurut Mardiasmo (2012) indikator *value for money* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) Ekonomi yang dimaksud ialah pembelian suatu barang maupun penggunaan jasa dengan tingkatan yang kualitasnya tertentu dengan harga terbaik (*spending less*). Tujuan dari *value for money* terhadap elemen ekonomi yaitu hemat dan cermat atas pengadaan pada kegiatan serta alokasi dari sumber daya yang ada di disnakerkopum.

2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas) Efektivitas yang artinya kontribusi pada output terhadap pencapaian untuk memperoleh tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja selalu disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*) sehingga keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja namun maknanya berbeda. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja yang secara tidak langsung seperti hal-hal yang sifatnya hanya terdapat indikasi-indikasi kinerja, sehingga akan cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja ialah kriteria kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga akan cenderung bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini dibutuhkan untuk memperoleh penilaian pada tingkat pencapaian suatu tujuan, strategi maupun sasaran.

Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pada pelayanan publik, yang dimaksud untuk memastikan agar pelayanan yang ditujukan sesuai dengan tujuannya, memperoleh peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik, dapat mengurangi biaya akan pelayanan publik, sehingga dapat mengurangi pemborosan serta memperoleh penghematan saat pemakaian input, mengalokasikan belanja dengan memprioritaskan pada kepentingan publik dan meningkatkan kesadaran uang publik (kesadaran biaya publik) sebagai dasar penerapan akuntabilitas publik.

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang adalah salah satu instansi pemerintahan yang memiliki fungsi dalam membina, mengendalikan serta mengawasi kegiatan yaitu memberikan pelatihan dibidang

tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro dengan mewujudkan visi serta pelaksanaan misi yang sesuai untuk membangun kota Tanjungpinang.

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk memperoleh target kinerja secara menyeluruh dalam melaksanakan program kerjanya.

Penelitian ini akan menganalisis kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dengan konsep *value for money*, terhadap beberapa aspek – aspek diantaranya adalah ekonomi, efisiensi dan efektivitas seluruh program kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat dilihat pada data laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian mengenai analisis kinerja dengan konsep *value for money* telah banyak dilakukan. Berikut diantaranya: hasil penelitian Purwiyanti (2017) menunjukkan bahwa kegiatan fisik pekerjaan irigasi donggala kodi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, ditinjau dari rasio ekonomi tahun 2014 mampu melaksanakan pekerjaan secara ekonomis. Jika dari rasio efisiensi, telah mampu menjalankan secara efisien. Sedangkan ditinjau dari rasio efektivitas, telah menjalankan keseluruhan pekerjaannya dengan efektif. Hasil penelitian Triniyati (2018) menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun periode 2015-2017 ditinjau dari elemen pengukuran ekonomi dinyatakan ekonomis, ditinjau dari elemen efisien periode tahun tahun 2015 dinyatakan efisien, dan pada tahun 2017 dinyatakan efisien berimbang, sedangkan ditinjau dari elemen efektivitas dinyatakan efektif. Hasil penelitian Eka Febyanti Rahayu (2020) menunjukkan bahwa Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin untuk tingkat ekonomis selama 4 tahun

menunjukkan hasil kinerja pada tahun 2016-2019 bernilai cukup ekonomis dan ekonomis. Pada tingkat efisiensi menunjukkan hasil tingkat kinerja yang kurang efisien dan tingkat efektivitas menunjukkan hasil yang sangat efektif.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang telah menemukan beberapa masalah yang terjadi di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Tabel 1.1
Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang

Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
2018	Rp. 5.152.938.550,-	Rp. 4.487.823.425,-	87,09%
2019	Rp. 5.809.631.500,-	Rp. 5.108.189.694,-	87,93%

Sumber: LAKIP Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang 2018-2019.

Anggaran belanja langsung yang terlihat pada tabel diatas, telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, realisasi anggaran yang terjadi belum mencapai target ekonomis, sehingga dalam penggunaan anggaran tersebut masih belum terserap sepenuhnya.

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,750,420,000	1,536,485,245
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	574,650,000	542,726,608
	Operasional Rutin Kantor	956,985,750	889,721,763

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	193,375,000	191,127,500
3	Peningkatan Daya Saing SDM Usaha Mikro		
	Peningkatan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro	191,779,500	158,009,400
4	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		
	Pelatihan Sablon	187,400,000	181,972,209
	Pelatihan dan Sertifikasi Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan	49,848,300	47,087,790
	Pelatihan Pangkas Rambut <i>Barber Shop</i>	174,369,000	0,00
5	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan		
	Penunjang Operasional Sekretariat Dewan Pengupahan (DEPEKO)	458,526,000	318,852,832
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS Tripartit) Kota Tanjungpinang	350,829,000	253,623,600
	Pengembangan Wawasan antar Daerah bagi Lembaga Ketenagakerjaan	100,000,000	52,905,000
	Peningkatan Kualitas Struktur dan Skala Upah bagi Pekerja dan Pengusaha	101,290,000	94,749,878
6	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		
	Pengembangan wawasan koperasi	114,535,000	108,484,600
	Pembentukan Kader - kader Koperasi	123,300,000	112,077,000

Sumber: LAKIP Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2018.

Di tahun 2018 ditemukan program/kegiatan yang tidak selesai pelaksanaannya maupun tidak dapat terlaksanakan, salah satunya yaitu kegiatan pelatihan pangkas rambut *barber shop* yang disebabkan karena adanya defisit

anggaran pada Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp.23.719.505.370,84, sehingga dana tidak tersedia untuk menjalankan kegiatan pelatihan tersebut. Selain itu, adanya efisiensi dan tertib anggaran yang menyebabkan anggaran yang ada tidak terserap secara keseluruhan untuk dijadikan SILPA.

Tabel 1.3
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,500,000,000	1,255,292,054
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	516,600,000	448,540,810
	Operasional Rutin Kantor	898,450,000	789,910,958
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	562,800,000	492,158,000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.		
	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program Kegiatan OPD	10,000,000	0.00
4	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		
	Penunjang Operasional Sekretariat Dewan Pengupahan (DEPEKO)	269,635,000	239,853,250
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS Tripartit) Kota Tanjungpinnag	244,897,500	222,224,843
	Pengembangan Wawasan antar Daerah bagi Lembaga Ketenagakerjaan	106,180,000	86,360,700
5	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		
	Pelatihan Pangkas Rambut Pria	209,265,000	198,586,210
	Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional	151.485.000	150,064,400

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	Pelatihan kewirausahaan Bagi Pencari Kerja Pemula	74.685.000	58,848,600
	AK1 On line dan Website Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro	144,500,000	133,569,752
	Pelatihan Menjahit dan Brodir	233,775,000	230,696,950
6	Program Perluasan Rencana Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang		
	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang	122,730,000	107,234,147
7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		
	Peningkatan Kualitas SDM untuk Manajemen Pengelolaan Koperasi Antar Daerah	223,659,000	218,228,500
	Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi	140,610,000	134,098,964
8	Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM		
	Fasilitasi KUR Bagi Usaha Mikro (SIKP)	141,235,000	117,033,700
9	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	Sertifikasi Tenaga Kerja di Bidang Pariwisata	130,165,000	112,438,101
	Sertifikasi Tenaga Kerja di Bidang Kelistrikan	128,965,000	113,049,755

Sumber: LAKIP Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2019.

Di tahun 2019 juga ditemukan satu kegiatan yang tidak dilaksanakan, yaitu pada program/kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program kegiatan OPD disebabkan karena banyaknya pengusulan sehingga kegiatan menjadi tidak matang baik pada anggarannya maupun target indikator.

Tabel 1.4
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2019

No	Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Pelatihan Pangkas Rambut <i>Barber Shop</i>	174.369.000	-	-	-
2.	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan OPD	10.000.000	-	-	-
3.	Penunjang Operasional Sekretariat Dewan Pengupahan (DEPEKO)	458,526,000	318,852,832	69.54	100
4.	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS Tripartit) Kota Tanjungpinang	350,829,000	253,623,600	72.29	100
5.	Pengembangan Wawasan antar Daerah bagi Lembaga Ketenagakerjaan	100,000,000	52,905,000	52,91	100
6.	Pelatihan kewirausahaan Bagi Pencari Kerja Pemula	74.685.000	58,848,600	78.80	95
7.	Sertifikasi Tenaga Kerja di Bidang Kelistrikan	128.965.000	113.049.755	87.66	86.88

Sumber: LKPJ Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2019.

Berdasarkan dari tabel 1.4, menunjukkan bahwa program/kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang masih ada output yang tidak mencapai target dan input yang lebih besar dibandingkan output. Sehingga kegiatan/program telah direncanakan menjadi tidak efisien dikarenakan beberapa hal yang menjadi faktor untuk tidak dilaksanakannya. Hal ini dinyatakan

bahwa, jika suatu program dikatakan efisien apabila semakin besar output yang akan dihasilkan dan semakin kecil input yang akan digunakan.

Pencapaian kinerja tahun 2018 dan 2019 pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dari 15 program terdapat 7 kegiatan belum mencapai sasaran yang terlihat pada tabel 1.4. Hal ini dikarenakan minimnya penyerapan pada anggaran kegiatan/program yang telah ditetapkan tidak mencapai sasaran sehingga menyebabkan perlunya dilakukan pengukuran kinerja dengan komprehensif, terhadap keluaran, hasil dan manfaat yang dapat dilihat serta dirasakan langsung oleh masyarakat agar bisa memperhitungkan dampaknya. Maka konsep *value for money* dibutuhkan untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan fenomena yang telah dibahas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **Analisis *Value for Money* Pada Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang periode tahun 2018-2019 ditinjau dari elemen ekonomi?
2. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang periode tahun 2018-2019 ditinjau dari elemen efisiensi?
3. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang periode tahun 2018-2019 ditinjau dari elemen efektivitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang periode tahun 2018-2019 ditinjau dari elemen ekonomi.
2. Mengetahui kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang periode tahun 2018-2019 ditinjau dari elemen efisiensi.
3. Mengetahui kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang periode tahun 2018-2019 ditinjau dari elemen efektivitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, referensi dan pemahaman mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *value for money*.

2. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang untuk memberikan gambaran dan masukan mengenai konsep *value for money* dalam penilaian kinerja keuangan sebagai evaluasi terhadap program kerja yang dijalankan. sehingga dalam melaksanakan program/kegiatan di masa depan dapat berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi serta pemahaman dalam melakukan penelitian yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman isi proposal ini, maka penulis menguraikan pokok masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah tentang analisis *value for money* pada kinerja keuangan pemerintah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika pada penulisan ini.

BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini merupakan bagian yang berisi landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam menguraikan berbagai teori penelitian melalui tinjauan pustaka dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian mengenai desain penelitian, objek penelitian, sumber dan jenis data yang diperoleh sebagai gambaran umum objek penelitian serta metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dari pembahasan yang telah dilakukan dalam menganalisa dan mengevaluasi hasil penelitian

tersebut dalam bentuk gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan berbagai saran dari hasil penelitian untuk masa yang akan datang.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu dasar guna mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan aktivitas berdasarkan target dan tujuan yang telah ditentukan untuk mencapai visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran yang dimaksud ialah hasil pada suatu penilaian secara sistematis yang didasarkan terhadap sekelompok indikator input, output, manfaat dan dampak. Evaluasi ini tidak terlepas dalam proses pengelolaan input jadi output maupun evaluasi dalam penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap akan mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Sedangkan pengukuran kinerja keuangan merupakan kemampuan untuk suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien (Munawir, 2011:50).

Penilaian kinerja menurut Mahmudi (2015) adalah suatu proses dalam mengevaluasi kemajuan pekerjaan pada pencapaian tujuan serta target yang sudah ditetapkan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam memperoleh hasil barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan pada sasaran, dan efektivitas tindakan untuk mencapai tujuan.

Dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian pelaksanaan aktivitas berdasarkan tujuan, target dan strategi sehingga dapat memajukan organisasi dengan meningkatkan mutu dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas serta

membandingkan hasil kegiatan dengan target juga efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memiliki tujuan untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan baik terhadap organisasi ataupun program-programnya. Hal ini diperlukan untuk mengevaluasi tingkatan besar kecilnya penyimpangan antara kinerja aktual dengan kinerja yang ditargetkan, sehingga menjadi dasar pentingnya mengukur tanggung jawab dalam memenuhi akuntabilitas serta harapan publik. Menurut Mardiasmo (2012) pengukuran pada suatu kinerja bertujuan untuk:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*).
2. Untuk mengukur kinerja finansial serta non-finansial yang berimbang sehingga mampu untuk ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah dalam memotivasi guna mencapai *goal congruence*.
4. Sebagai alat dalam mencapai kepuasan berdasarkan pada pendekatan individual serta kemampuan kolektif secara rasional.

2.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2012:122) pengukuran kinerja memperoleh manfaat antara lain untuk:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran guna untuk mengukur kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengevaluasi pada proses pencapaian kinerja dan membandingkannya

dengan sasaran kinerja dan melakukan tindakan korektif dalam hal memperbaiki kinerja.

- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif dalam pencapaian prestasi yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang sudah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi terhadap bawahan serta pimpinan dalam rangka mengevaluasi kinerja organisasi maupun program kegiatan.
- f. Membantu untuk mengidentifikasi terhadap kepuasan pelanggan yang telah terpenuhi.
- g. Membantu dalam memahami proses yang dilaksanakan pada kegiatan instansi pemerintah, dan
- h. Memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif.

2.1.4 Kelebihan Dalam Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2012:122) kelebihan dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja.
- 2) Memberikan arahan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman.
- 5) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

- 6) Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.

2.1.5 Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Menurut Mahsun dkk. (2013:142) elemen-elemen pokok dalam pengukuran kinerja antara lain:

- a. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi.

Tujuan merupakan pernyataan secara umum (belum secara eksplisit) tentang apa yang akan dicapai pada suatu organisasi. Sasaran ialah tujuan organisasi yang telah dinyatakan secara eksplisit yang disertai dengan batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan oleh organisasi untuk memperoleh capaian tujuan maupun sasaran. Tujuan, sasaran dan strategi ini sudah ditetapkan dengan berpedoman pada visi serta misi organisasi.

- b. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung ialah hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja serta pengukuran ini harus dibutuhkan dalam menilai tingkatan ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi organisasi.

- c. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Mengukur tingkatan pencapaian tujuan, sasaran dan strategi merupakan perbandingan hasil aktual dengan indikator pada pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini bisa memperoleh penyimpangan positif, penyimpangan negatif, maupun penyimpangan

nol. Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan diterapkan sudah berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil dicapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang sudah ditetapkan. Penyimpangan nol ialah kegiatan telah berhasil dicapai atau sama dengan indikator dan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.

d. Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja hendak diberikan gambaran terhadap penerima informasi mengenai ukuran kinerja yang akan dicapai organisasi. Informasi pencapaian kinerja ini dapat diperoleh sebagai:

1. *Feedback*, ialah pengukuran terhadap capaian kinerja sebagai dasar bagi manajemen maupun pengelola organisasi guna memperbaiki kinerja pada periode selanjutnya.
2. Penilaian kemajuan organisasi, ialah pengukuran kinerja yang dilaksanakan pada setiap periode dengan kurun waktu tertentu sehingga akan bermanfaat dalam menilai kemajuan yang akan dicapai organisasi. Kriteria yang digunakan untuk menilai kemajuan organisasi yaitu tujuan yang akan ditetapkan. Dengan hasil perbandingan yang aktual terhadap pencapaian dengan tujuan organisasi yang dilakukan secara berkala hingga kemajuan organisasi biasa diawali.
3. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang akuntabilitas, ialah pengukuran kinerja yang akan memperoleh informasi bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen ataupun *stakeholders*.

2.1.6 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun bagi publik. Saat ini terdapat perhatian yang semakin luas mengenai praktik akuntansi yang banyak dilakukan pada lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan. Menurut Halim (2014) definisi dari akuntansi pemerintah daerah yang disebut sebagai Akuntansi Keuangan Daerah ialah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan terhadap transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memperoleh informasi dalam rangka untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukannya.

Mardiasmo (2012:37) dalam pengertian umum, khususnya dunia akuntansi dinegara-negara maju maka organisasi sektor publik dibagi tiga kelompok besar ialah :

1. Pemerintah Pusat, yang terdiri beberapa departemen serta badan-badan di bawah pemerintah eksekutif.
2. Industri ataupun perusahaan yang memiliki kepentingan publik maupun bagi masyarakat luas.
3. Pemerintah Daerah, baik pada tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.

Sektor publik merupakan keseluruhan yang berhubungan pada kepentingan publik serta tentang penyediaan barang dan jasa yang diperuntukkan bagi publik, lalu dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang telah diatur sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari pengertian diatas, disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan kegiatan yang dilakukan pada bidang keuangan guna pengambilan keputusan dalam menyediakan kebutuhan serta hak publik umum melalui pelayanan publik yang diselenggarakan dari entitas pemerintah daerah.

2.1.7 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan dari akuntansi sektor publik menurut *American Accounting Association* (1970) dalam Jamaluddin (2019:10) dinyatakan sebagai berikut :

1. *Accountability*, Tujuan dari akuntansi sektor publik ialah digunakan dalam memberikan informasi yang berguna bagi manager sektor publik serta pelaporan yang di pertanggung jawaban pada bidang, divisi, maupun sumber daya yang berada di bawah naungannya. Selain itu, maksud dari tujuan lainnya juga digunakan untuk melaporkan kegiatan pada publik atas operasi pemerintahan dan dalam penggunaan anggaran publik.
2. *Management Control*, Tujuan dari adanya akuntansi sektor publik ialah bisa memberikan informasi yang akan dibutuhkan dalam mengelola suatu lembaga/organisasi secara tepat, cepat, efisien, dan ekonomis atas operasi serta pemakaian sumber daya yang sudah dianggarkan pada suatu organisasi/lembaga.

2.1.8 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.

Menurut Renyowijoyo (2013), Akuntansi sektor publik ditujukan untuk mencapai hasil tertentu, yang memiliki manfaat terhadap publik. Dalam beberapa hal mengenai akuntansi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, disebabkan adanya perbedaan lingkungan yang dipengaruhi. Sifat dari organisasi sektor publik

paling utama adalah tujuan, sifat dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi nonlaba yaitu tidak mencari laba dengan tujuannya dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dan dapat memberikan maupun meningkatkan kesejahteraan. Pemberi dana tidak berkehendak untuk memperoleh pengembalian, bunga, ataupun mempunyai organisasi. Akuntansi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks. Komponen lingkungan dapat mempengaruhi sektor publik yang meliputi faktor ekonomi, politik, kultur dan demografi.

2.1.9 Karakteristik Lingkungan Akuntansi Sektor Publik

Haryanto dkk dalam Jamaluddin (2019:14) Lingkungan operasional pada organisasi sektor publik khususnya pemerintahan mempengaruhi karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting pada lingkungan pemerintahan yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan tujuan dari akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Ciri Struktur Pemerintahan dan Pelayanan Yang Diberikan
 - a. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan, pendelegasian kekuasaan merupakan pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini diartikan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan pada kekuasaan antara penyelenggara di pemerintahan. Sebagaimana berlaku pada lingkungan keuangan pemerintahan, pihak eksekutif dalam menyusun anggaran serta menyampaikannya ke pihak legislatif untuk diperoleh

persetujuan. Pihak eksekutif ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut ke pihak legislatif dan juga kepada rakyat.

- b. Sistem pada pemerintahan otonomi, secara substansial, memiliki tiga lingkup pemerintahan terhadap sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah yang memiliki cakupannya yang lebih luas dapat memberikkan arahan kepada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit.
- c. Adanya pengaruh proses politik, pemerintah daerah memiliki salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan pada seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu karakteristik yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.
- d. Hubungan antara pembayaran pajak terhadap pelayanan pemerintah daerah, meskipun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah harus memungut secara langsung atas pelayanan yang telah diberikan, sebagian besar pendapatan pemerintah daerah itu bersumber dari hasil pungutan pajak dalam rangka dapat memberikan pelayanan ke masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut, hal ini tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah terhadap wajib pajak. Pajak yang dipungut

serta pelayanan yang telah diberikan pemerintah daerah memiliki sifat-sifat tertentu yang harus dipertimbangkan guna meningkatkan laporan keuangan, antara lain yaitu: pembayaran pajak bukan merupakan sumber dari pendapatan yang bersifat suka rela, jumlah pajak yang dibayar akan ditetapkan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana sudah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk efisiensi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dibanding dengan pungutan yang dimanfaatkan dalam pelayanan yang diartikan sering sukar akan diukur sehubungan dengan monopoli pada pelayanan pemerintah daerah.

2. Ciri Keuangan Pemerintah Daerah yang Penting Bagi Pengendalian
 - a. Anggaran sebagai pernyataan terhadap kebijakan publik, target fiskal, dan alat pengendalian. Anggaran pemerintah daerah ialah dokumen formal yang diperoleh hasil kesepakatan diantara eksekutif serta legislatif mengenai belanja yang sudah ditetapkan untuk melakukan program kegiatan di pemerintah daerah dan pendapatan yang akan diharapkan dapat menutupi keperluan belanja atau pembiayaan yang akan diperlukan dapat diperkirakan apakah akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran yang mengkoordinasi mengenai aktivitas belanja pemerintah daerah serta memberikan landasan pada upaya dalam perolehan pendapatan dan pembiayaan pemerintah daerah untuk suatu periode tertentu yang biasanya akan mencakup periode tahunan. Maka dari itu, mengenai fungsi anggaran pada lingkungan pemerintah daerah memiliki pengaruh penting terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain dikarenakan:

- 1) Anggaran ialah pernyataan terhadap kebijakan publik.
 - 2) Anggaran ialah target fiskal yang digambarkan mengenai keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang dibutuhkan.
 - 3) Anggaran sebagai landasan dalam pengendalian yang memperoleh akan konsekuensi hukum.
 - 4) Anggaran sebagai landasan pada penilaian kinerja di pemerintah daerah.
 - 5) Hasil penerapan anggaran ini harus dituangkan ke laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bukti pernyataan mengenai pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah kepada publik.
- b. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, pemerintah daerah dapat menginvestasikan dana besar dengan bentuk aset yang tidak secara langsung akan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah seperti jembatan, gedung perkantoran, taman, jalanan dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset yang dimaksud memiliki masa manfaat yang lama agar program pemeliharaan serta rehabilitasi dapat memadai yang akan diperlukan guna mempertahankan manfaat yang hendak dicapainya. Dengan demikian, fungsi dari aset bagi pemerintah daerah akan berbeda dengan organisasi komersial, karena Sebagian besar dari aset tersebut tidak memperoleh pendapatan secara langsung pada pemerintah daerah, bahkan malah akan menimbulkan komitmen terhadap pemerintah daerah dalam memeliharanya di masa yang akan datang.
- c. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pada pengendalian, akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan suatu sistem akuntansi serta

pelaporan keuangan yang pada umumnya diterapkan pada lingkungan pemerintah daerah yang dapat memisahkan kelompok dana sesuai dengan tujuannya, sehingga masing-masingnya merupakan entitas akuntansi yang dapat menunjukkan pada hal keseimbangan antara belanja, pendapatan ataupun transfer yang akan diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan sebagai tujuan dari pengendalian tiap-tiap kelompok dana selain dari kelompok dana umum (*the general fund*), hal ini dapat dipertimbangkan dengan pengembangan pada pelaporan keuangan di pemerintah daerah.

2.1.10 Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Menurut Mahmudi (2015) kinerja dimaksud dengan salah satu konstruksi yang bersifat multidimensional serta pengukurannya bergantung terhadap kompleksitas pada faktor-faktor yang akan membentuk dan mempengaruhinya, antara lain:

- a. Faktor personal/individu, meliputi: pengetahuan, motivasi, kepercayaan diri, skill, komitmen dan kemampuan yang dimiliki setiap masing-masing individu.
- b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas terhadap dorongan semangat, arahan bahkan dukungan yang diberikan dari *manager* atau *team leader*.
- c. Faktor tim, meliputi: kualitas dan semangat dari rekan satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan maupun kekerabatan sesama anggota tim.
- d. Faktor sistem, meliputi: sistem kinerja, sarana kerja atau infrastruktur yang diberikan dari organisasi, proses dan kultur kinerja organisasi.

- e. Faktor kontekstual/situasional, meliputi: tekanan terhadap perubahan pada lingkungan eksternal maupun internal suatu organisasi.

Pengukuran kinerja memiliki bagian terpenting pada proses pengendalian manajemen pada sektor publik, menurut Mahmudi (2015) pengukuran kinerja pada sektor publik mempunyai enam tujuan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui tingkat pencapaian dari suatu tujuan organisasi.
- b. Menyediakan fasilitas untuk pembelajaran bagi pegawai.
- c. Memperbaiki kinerja agar dapat memperoleh kinerja yang baik pada periode selanjutnya.
- d. Memberikan pertimbangan secara sistematis dalam pengambilan keputusan *reward* dan *punishment*.
- e. Memberikan motivasi bagi pegawai.
- f. Menciptakan akuntabilitas pada publik

2.1.11 Aspek-aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Organisasi sektor publik mempunyai sifat dan karakteristiknya yang menarik, hal ini organisasi sektor publik harus memerlukan ukuran mengenai penilaian kinerja yang lebih sangat luas, tidak hanya pada tingkat laba, efisiensi dan juga ukuran finansial. Pengukuran kinerja pada organisasi sektor public memperoleh beberapa aspek-aspek antara lain (Mahsun, dkk, 2013:148) :

- a. Kelompok masukan (*input*) adalah sesuatu yang akan dibutuhkan pada pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan sehingga menghasilkan keluaran.

- b. Kelompok proses (*process*) adalah ukuran kegiatan yang diperoleh dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan pada kegiatan yang terlaksanakan.
- c. Kelompok keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diperoleh langsung serta dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) ataupun tidak (*untangible*).
- d. Kelompok hasil (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran pada kegiatan dengan jangka menengah yang memperoleh efek langsung.
- e. Kelompok manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang tertuju pada hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
- f. Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh yang dapat menimbulkan sesuatu baik dari positif ataupun negatif.

2.1.12 Value For Money

Value for money merupakan istilah mengenai pengukuran pada suatu kinerja di organisasi pemerintah. Kinerja pada pemerintah tidak hanya meliputi nilai dari output yang dihasilkan, namun dapat dipertimbangkan terhadap input, output, dan juga outcome. Menurut Arisaudi (2016) *Value for money* ialah tolak ukur terhadap pengukuran kinerja di organisasi pemerintah yang didasarkan pada pengukuran dari ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan menurut Halim et al (2014) *Value for money* merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas terhadap kinerja dari program, kegiatan serta organisasi, yaitu ekonomi yang terkait akan mengukur sejauh mana organisasi pemerintah dapat meminimalisir input

resource yang telah digunakan dengan menghindari atas pengeluaran yang boros maupun tidak produktif, sedangkan efisiensi akan terkait pada pencapaian output yang maksimum terhadap input tertentu dan efektivitas memperoleh tingkat dari hasil pencapaian program dengan target yang telah ditetapkan.

Komponen yang utama dalam penilaian kinerja berdasarkan pengukuran *value for money* dibagi atas tiga (Mahmudi, 2015) sebagai berikut:

1. Komponen misi, visi, tujuan, target serta sasaran.
2. Komponen input, proses, output, dan outcome.
3. Komponen pengukuran terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

2.1.13 Indikator Value For Money

1. Indikator Alokasi Biaya (Ekonomi dan Efisiensi).

Ekonomi merupakan praktik pada pembelian barang dan jasa yang dilihat pada tingkatan kualitas tertentu terhadap harga terbaik (*spending less*). Ekonomi memiliki pengertian yang artinya memperoleh sumber daya dengan harga terendah sehingga mendekati harga pasaran. Ekonomi (hemat/tepat sasaran) sering juga disebut dengan penghematan yang meliputi pada pengelolaan dengan kehati-hatian atau dengan cermat (*prudence*) sehingga tidak terjadi pemborosan. Kegiatan operasional yang dilaksanakan dapat dinyatakan ekonomis apabila dapat melakukan penghematan dengan cara menghilangkan atau mengurangi biaya yang seharusnya tidak perlukan.

Efisiensi merupakan suatu produk atau hasil kerja tertentu yang diperoleh dalam penggunaan sumber daya atau dana serendah-rendahnya (*spending well*). Suatu organisasi, program, maupun kegiatan dinyatakan efisien apabila mampu

dalam memperoleh hasil output tertentu dengan input yang serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu memperoleh output dengan sebesar-besarnya.

2. Indikator Kualitas Pelayanan (Efektivitas).

Efektifitas adalah proses dari suatu kegiatan yang memperoleh tujuan sasaran akhir pada kebijakan (*spending wisely*). Suatu organisasi, program maupun kegiatan dapat dinyatakan efektif apabila output yang diperoleh mampu untuk memenuhi tujuan yang akan diharapkan.

2.1.14 Tujuan Value For Money

Tujuan pelaksanaan dari pengukuran *value for money* adalah ekonomi yaitu hemat cermat dalam penggunaan terhadap alokasi sumber daya sedangkan efisiensi yaitu berdaya gunakan sumber daya dan efektivitas yaitu hasil guna dalam pencapaian pada tujuan dan sasaran.

- 1) Meningkatkan efektivitas pada pelayanan publik, yang artinya pelayanan pada tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan kualitas pada pelayanan publik.
- 3) Mengurangi biaya pelayanan publik yang disebabkan in-efisiensi serta penghematan terhadap penggunaan input.
- 4) Alokasi belanja yang berorientasi lebih terhadap kepentingan publik.
- 5) Meningkatkan pemahaman akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai sumber dalam penerapan akuntabilitas pada publik.

2.1.15 Konsep Pengukuran Kinerja *Value For Money*

Mardiasmo (2009:4) dalam Arfan (2014:12) konsep pengukuran kinerja *value for money* ialah suatu konsep dalam mengelola organisasi sektor publik yang didasari pada tiga elemen utama, yaitu elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

1. Pengukuran Ekonomi

Pada konteks organisasi pemerintahan, ukuran ekonomi terbentuk dari berapa anggaran yang dialokasikan untuk melakukan pembiayaan pada kegiatan tertentu. Apabila sumber daya yang telah dikeluarkan berada di bawah anggaran yang ditargetkan maka hal ini akan memperoleh penghematan. Sebaliknya, apabila sumber daya yang dikeluarkan di atas anggaran yang telah ditargetkan, maka hal ini akan menimbulkan pemborosan. Ekonomis dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2015:21):

$$Ekonomis = \frac{\text{input}}{\text{harga input (Rp)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Input: Realisasi anggaran pada setiap kegiatan.

Harga Input: Anggaran pada setiap kegiatan.

Berikut ini merupakan kriteria dari ekonomis kinerja keuangan:

Tabel 2.1
Kriteria Pengukuran Ekonomi

Ekonomi	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Ekonomis
90 s/d 100%	Kurang Ekonomis
80 s/d 90%	Cukup Ekonomis
60 s/d 80%	Ekonomis
Dibawah 60%	Sangat Ekonomis

Sumber: Abdul Halim (2007) dalam Renyowijoyo (2013:5)

2. Pengukuran Efisiensi

Mardiasmo dalam Putra (2015) menyatakan bahwa efisiensi ialah perbandingan mengenai output atau input yang dihubungkan dengan standar pada kinerja ataupun target yang sudah ditetapkan. Renyowijoyo (2013:4) juga menyebutkan bahwa efisiensi ialah hasil dari pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum terhadap masukan tertentu atau penggunaan pada masukan terendah untuk memperoleh hasil keluaran tertentu. Semakin besar output dibandingkan pada input, maka semakin tinggi pula tingkat capaian efisiensi pada suatu organisasi. Efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2015:22):

$$Efisiensi = \frac{output}{input} \times 100\%$$

Keterangan:

Output: Persentase hasil yang dicapai pada setiap kegiatan.

Input: Persentase tingkat ekonomis.

Berikut ini merupakan kriteria dari efisiensi kinerja keuangan:

Tabel 2.2
Kriteria Pengukuran Efisien

Efisien	Kriteria
100% - Keatas	Sangat Efisien
90 s/d 100%	Efisien
80 s/d 90%	Cukup Efisien
60 s/d 80%	Kurang Efisien
Kurang dari 60%	Tidak Efisien

Sumber: Prasetyo (2016:110)

3. Pengukuran Efektifitas

Mardiasmo dalam Aulia (2014) menyatakan bahwa efektifitas merupakan gambaran dari hasil tingkat pencapaian pada program/kegiatan yang sudah ditargetkan. Secara sederhana efektifitas ialah perbandingan antara outcome dengan output. Efektifitas dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2015:22):

$$Efektifitas = \frac{outcomes}{output} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome: Persentase hasil yang dicapai pada setiap kegiatan.

Output: Persentase tingkat efisien.

Berikut ini merupakan kriteria dari efektifitas kinerja keuangan:

Tabel 2.3
Kriteria Pengukuran Efektifitas

Efektif	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% s/d 100%	Efektif
80% s/d 90%	Cukup Efektif
60% s/d 80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber: Abdul Halim (2007) dalam Renyowijoyo (2013:5)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Angga Pratama, Iskandar Sam, Misni Erwati (2020).	Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Jambi Berdasarkan Konsep <i>Value for Money</i> .	Deskriptif Kualitatif.	Perhitungan rasio ekonomi di tahun 2017 hingga 2019 ialah 94,25%,91,71%,94,97% dengan capaian ekonomis. Perhitungan rasio efisiensi ditahun 2017 sampai dengan 2019 masing-masing 100,55%, 102,07%,101,74% dengan capaian efisien. Sedangkan untuk rasio efektivitas tahun anggaran 2017 hingga 2019 yaitu masing-masing programnya adalah 100%.
2.	Yulia Nurhanifah Husna (2020).	Analisis <i>Value for Money</i> Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh periode 2017-2018

		Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Periode 2017-2018		jika dilihat segi ekonomis telah mencapai kriteria dengan rata-rata cukup ekonomis. Dari segi efisiensi kegiatan yang dilaksanakan dengan mencapai kriteria rata-rata tidak efisien dan dari segi efektivitas telah mencapai kriteria dengan rata-rata cukup efektivitas.
3.	Deni Solihin (2019).	Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan <i>Value for Money</i> Pada Politeknik TEDC Bandung (Periode 1 September 2017/31 Agustus 2018).	Deskriptif Kualitatif.	Hasil menunjukkan pada kinerja Politeknik TEDC Bandung Periode 1 September 2017 s/d 31 Agustus 2018 ditinjau dari pengukuran ekonomi mencapai cukup ekonomis pada tingkat rasio ekonomis 87.69%. Ditinjau dari pengukuran efisiensi terhadap pendapatan dikategori mencapai cukup efisien pada tingkat rasio efisien 88.06%. Ditinjau dari pengukuran efektivitas kinerja dikategori dengan capaian cukup efektif pada rasio efektivitas 85.00%.
4.	Indriyani, Khairunnisa (2018)	Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep <i>Value for Money</i> Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)	Deskriptif Kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah mencapai kinerja yang baik, Rasio efisiensi kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe cukup baik.. Rasio efektifitas pada Pemerintah Kota Lhokseumawe kinerja pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun tersebut dinilai tidak efektif.
5.	Immanuel R. A. Polii, David P. E. Saerang, Steven J. Tangkuman (2020)	Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep <i>Value for Money</i>	Deskriptif Kualitatif.	Hasil penelitian dari rasio ekonomi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015-2017 sudah ekonomis, karena menghasilkan rasio lebih dari 100%. Rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan dinilai efisien, karena hasil

				perhitungan rasio yang diperoleh berada diantara 90% sampai 99% sedangkan rasio efektivitas menunjukkan kinerja keuangan yang dikategorikan cukup efektif, karena hasil perhitungan rasio yang diperoleh berada diantara 85% sampai 99%.
--	--	--	--	--

2.3 Hipotesis

Dari latar belakang dan telaah pustaka, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

“Kinerja Keuangan Pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Belum Sesuai Dengan Prinsip *Value For Money*”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Herdiansyah (2012:18) adalah suatu penelitian ilmiah bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengutamakan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Sugiyono (2014:3) mengemukakan bahwa pada penelitian deskriptif, pengumpulan data tidak hanya dipandu oleh teori, tetapi juga dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan dari kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang jika dilihat atau dievaluasi menggunakan Rasio *Value for Money* dengan mengumpulkan serta menyajikan data yang diterima dari instansi tersebut berbentuk data-data sebagai pendukung sehingga dapat memberikan gambaran cukup jelas bagi penulis dalam menganalisis dan membandingkan dengan teori-teori yang ada.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bagian administrasi data dan pelaporan di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang yang terletak di Jalan Daeng Celak, Senggarang. Kota Tanjungpinang.

Objek penelitian ini yaitu kinerja keuangan dengan pendekatan *Value for Money* pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang yang diperoleh dari data Pencapaian Realisasi Keuangan pada Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang tahun 2018-2019.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dapat dibagi menjadi dua jenis:

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi yang didapatkan secara langsung, seperti data yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang tahun 2018-2019.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti literatur, jurnal, skripsi, buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan analisis *value for money* pada pengukuran kinerja keuangan sektor publik sebagai penunjang penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang berupa data tentang masalah penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk memperoleh data adalah dokumentasi dan studi kepustakaan.

3.4.1 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai penelitian yang sedang dilakukan. Untuk penelitian ini dokumentasi yang diperlukan yaitu berupa data Pencapaian Realisasi Keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumentasi lainnya.

3.4.2 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dari beberapa referensi atau teori-teori dasar yang relevan terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian. Informasi yang diperoleh yaitu dari buku, jurnal, skripsi yang berhubungan dengan analisis *value for money* pada pengukuran kinerja sektor publik.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan suatu kondisi dari objek tertentu pada saat penelitian sedang dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

3.5.1 *Collecting*/Pengumpulan Data

Pengumpulan data, berkaitan dengan Laporan Realisasi dan Anggaran berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang diperoleh dari hasil observasi.

3.5.2 Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum serta memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Setelahnya maka data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, serta memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, ataupun mencari jika dibutuhkan. Dengan mereduksi data maka peneliti memfokuskan pada laporan realisasi dan anggaran instansi serta menghubungkan semua data yang diperoleh dengan teori yang ada.

Pengukuran kinerja keuangan ditinjau dari segi ekonomis yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka oleh berikut (Mahmudi:2015):

$$Ekonomis = \frac{input}{harga\ input\ (Rp)} \times 100\%$$

Efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi:2015):

$$Efisiensi = \frac{output}{input} \times 100\%$$

Efektifitas dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi:2015):

$$Efektifitas = \frac{outcomes}{output} \times 100\%$$

3.5.3 Penyajian Data

Penyajian data adalah langkah yang dilakukan setelah mereduksi data. Penyajian data dalam kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Seperti yang disampaikan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) bahwa yang paling sering digunakan pada penyajian data dalam kualitatif adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data pula, maka akan memudahkan

peneliti untuk memahami apa yang terjadi serta merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data pada peneliti ini dilakukan dengan mengevaluasi kinerja keuangan berdasarkan laporan realisasi dan anggaran yang telah dianalisis.

3.5.4 Penarikan Kesimpulan

Melakukan simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai *Value for Money* dalam pengukuran kinerja keuangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Tanjungpinang

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang merupakan instansi pemerintah daerah yang berfungsi dalam membina, mengendalikan serta mengawasi kegiatan dengan melaksanakan urusan pemerintah dibidang tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro. Instansi ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan, maka urusan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, disusunlah Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja daerah Kota Tanjungpinang.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Tanjungpinang

1. Visi

Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani.

2. Misi

- a. Meningkatkan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat.
- b. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan.

4.1.3 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang memiliki struktur organisasi yang terdiri:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas.
 - b. Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
 - c. Seksi Informasi dan Perluasan Tenaga Kerja.
4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja.
 - b. Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - c. Seksi Pengupahan, Organisasi Pekerja dan Pengusaha.
5. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi.
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

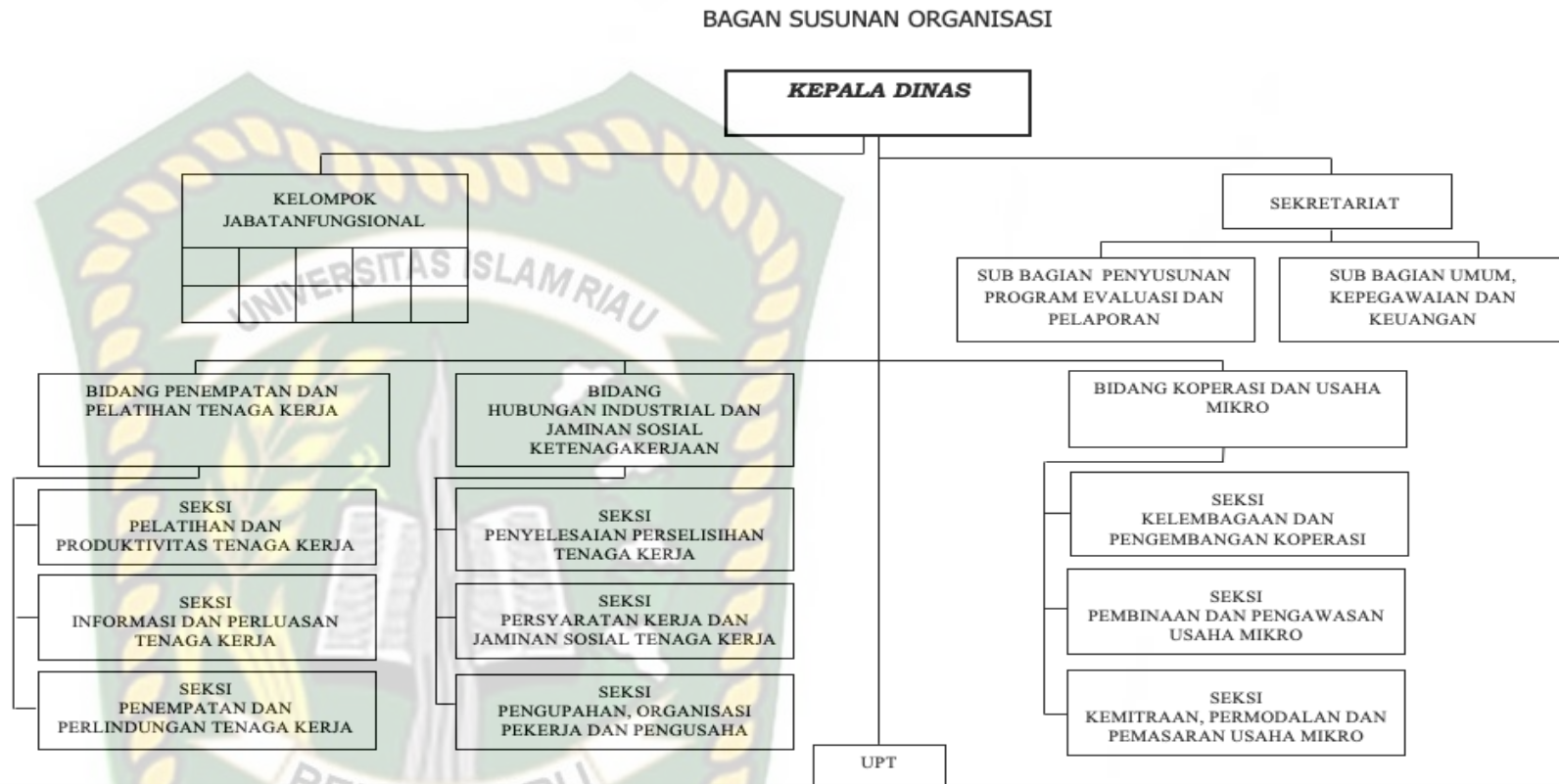
- c. Seksi Kemitraan, Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro.
6. UPTD.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang



4.1.4 Tugas Pokok dan Tanggungjawab

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dapat uraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria.
- c. Pemberian bimbingan teknis dan *supervise*.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.
- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.
- h. Pelayanan terhadap pemberian rekomendasi dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- i. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya.
- j. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas membawahi:

- a. Sekretariat.
- b. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja.
- c. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

2. Sekretariat

Sekretariat Mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas.
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas meliputi penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, serta keuangan;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventarisasi.
- d. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- e. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan masyarakat.
- f. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat membawahi Sub Bagian, antara lain:

a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja dinas.
 2. Penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas.
 3. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring program kerja dinas.
 4. Pengkoordinasian internal dalam penyusunan program kerja dinas.
 5. Pembuatan laporan kegiatan program kerja tahunan.
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

Tugas pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

Fungsi :

1. Penyusunan kebutuhan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga dinas.
2. Penerimaan, penganalisaan dan pengendalian serta penyampaian administrasi tata persuratan.
3. Pengetikan, pengolahan, pencatatan serta pengaturan klasifikasi tata

persuratan.

4. Penghimpunan dan penataan kearsipan.
5. Pengaturan, pemeliharaan dan perawatan kerahasiaan arsip.
6. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi barang daerah.
7. Pelaksanaan pelaporan pengadaan barang dan penyusunan inventarisasi barang.
8. Pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi dan kearsipan dinas.
9. Pengaturan dan pengkoordinasian urusan rumah tangga dinas, pemeliharaan kantor, pemeliharaan kendaraan dinas. Kebersihan, keamanan dan tugas lainnya.
10. Pelaksanaan dan pengaturan ketatalaksanaan rumah tangga dinas.
11. Penyusunan dan pelaporan kegiatan subbag umum kepada sekretaris.
12. Pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai.
13. Pelaksanaan tata laksana kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, daftar penilaian prestasi pegawai (DP-3/SKP), mutasi, sanksi kepegawaian, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian.
14. Pembuatan analisa dan penyusunan rencana kebutuhan pegawai berdasarkan pendidikan dan latihan serta pangkat dan jabatan.
15. Pengurusan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
16. Pelaksanaan dokumentasi kegiatan pegawai.
17. Penyusunan rencana dan tata laksana belanja tidak langsung.
18. Penyelenggaraan, pelaksanaan dan penyelesaian administrasi pegawai.
19. Penyelenggaraan dan pelaksanaan penyusunan dan pelaporan keuangan.
20. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembukuan, pertanggungjawaban, verifikasi,

pelaporan dan pembinaan bendaharawan.

21. Penyusunan dan pelaporan pengelolaan keuangan.

22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja.

Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan rencana program kerja tahunan bidang penempatan dan pelatihan kerja.
- b. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penempatan dan pelatihan kerja.
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengoordinasian serta pembinaan teknis penempatan dan pelatihan kerja.

Perencanaan dan pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja.

- d. Perencanaan dan pelaksanaan pelatihan dan produktifitas.
- e. Perencanaan dan pelaksanaan informasi dan perluasan tenaga kerja, memproses pengajuan usulan atau rekomendasi penetapan penempatan dan pelatihan kerja.
- f. Pelaksanaan pelayanan rekomendasi dan perizinan di bidang penempatan dan

pelatihan kerja.

- g. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan penempatan dan pelatihan kerja.
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penempatan dan pelatihan kerja.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya membawahi Seksi antara lain:

- a. Seksi Pelatihan dan Produktifitas

Tugas pokok:

Membantu kepala Bidang Penempatan dan Pelatuhan Tenaga Kerja dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingantekhnis, fasilitasi, koordinasi serta supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lingkup pelatihan dan produktifitas.

Fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan seksi.
2. Penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelatihan dan produktifitas.
3. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi pelatihan dan produktifitas.
4. Pengidentifikasian dan penyusunan rencana anggaran pelatihan rutin, pembangunan dan kerjasama dengan pihak ketiga.
5. Penyusunan jadwal waktu pelaksanaan pelatihan rutin, pembangunan dan kerjasama dengan pihak ketiga.

6. Penetapan persyaratan administrasi peserta pelatihan dan mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan pelatihan.
7. Penyusunan rencana program-program pelatihan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan potensi serta menyelenggarakan pelatihan.
8. Pelaksanaan pelatihan dan pemagangan untuk tenaga kerja yang disesuaikan dengan potensi serta menyelenggarakan pelatihan.
9. Pengembangan program-program pelatihan yang dilaksanakan dengan mengajukan kepada trilogi pelatihan.
10. Pelaksanaan terhadap sebagian tugas kepala bidang dalam memberikan pelayanan umum dan teknis di bidang pelatihan sesuai dengan sifat dan keperluannya.
11. Penyusunan dan penyiapan pedoman bagi perizinan lembaga pelatihan kerja.
12. Penyusunan dan penyiapan pedoman teknis pembinaan bagi instruktur, tenaga pelatihan dan pemagangan tenaga kerja.
13. Penyusunan dan penyiapan pedoman teknis bagi pelatihan tenaga kerja dan konsultasi pekerja.
14. Penginventarisasian sertifikasi kelembagaan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja mencakup jenis sertifikat yang berlaku, jumlah tenaga kerja menurut sertifikasinya dan jumlah lembaga pelatihan.
15. Pengadaan registrasi lulusan lembaga latihan baik pemerintah, perusahaan dan lembaga pelatihan swasta.
16. Penginventarisasian kelembagaan, instruktur, tenaga pelatihan program dan kegiatan pengembangan produktivitas serta menginventarisasi data program

yang mencakup jenis pelatihan, kualifikasi iuran serta lembaga penyelenggaraanya.

17. Penginventarisasian lembaga pelaksana pengembangan produktivitas yang mencakup program jenis sertifikasi yang berlaku, jumlah tenaga kerja menurut sertifikasinya dan jumlah lembaga pelatihan menurut akreditasinya;
 18. Penyiapan bahan pembinaan kelembagaan produktivitas untuk meningkatkan kualitas pelatihan di lembaga latihan.
 19. Penyiapan bahan pembinaan kelembagaan produktivitas untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan akreditasi lembaga latihan.
 20. Pelaksanaan pelayanan rekomendasi dan perizinan di seksi pelatihan dan produktifitas.
 21. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelatihan dan produktivitas.
 22. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pelatihan dan produktifitas.
 23. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;

Tugas pokok :

Membantu Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, fesilitasi, koordinasi serta supervisi serta pemantauan, evaluasidan pelaporan pelaksanaan kebijakan lingkup penempatan dan perlindungan tenaga kerja.

Fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan seksi.
2. Penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penempatan dan perlindungan tenaga kerja.
3. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi penempatan dan perlindungan tenaga kerja.
4. Pengidentifikasian dan penyusunan rencana anggaran penempatan dan perlindungan tenaga kerja.
5. Penyiapan bahan penyusunan distem dan pedoman pembinaan informasi persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja.
6. Penyiapan bahan pembinaan, rencana dan kegiatan untuk penyaluran tenaga kerja antar lokal, kerja antar daerah dan kerja antar negara.
7. Penyiapan bahan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan tenaga kerja pemerintah, tenaga kerja pemuda dan wanita, tenaga kerjapenyandang cacat dan lanjut usia.
8. Pelaksanaan proses rekomendasi perizinan bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), penyaluran tenaga kerja antar lokal, daerah dan antar negara.
9. Penelitian dan penilaian tentang kebenaran rencana kebutuhan TKI yang diajukan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan membubuhkan persetujuan pada Surat Permintaan TKI (*Job Order*) dan meneliti perjanjian kerjasama antar TKI dengan pengguna setelah Calon TKI yang bersangkutan memperoleh Visa Kerja, serta meneliti dokumen persyaratan bagi calon TKI yang akan diberangkatkan ke Luar Negeri.

Pembinaan, pengendalian evaluasi, serta koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan program penyaluran tenaga kerja lokal, antar daerah dan antar negara.

10. Pelaksanaan monitoring dan penilaian pelaksanaan rencana dan kegiatan penyaluran tenaga kerja antar lokal, daerah dan antar negara termasuk pendeportasian TKI Illegal, penyaluran tenaga kerja pemuda dan wanita, tenaga kerja penyandang cacat dan usia lanjut.
11. Pelaksanaan pengumpulan data, menyiapkan bahan dan menyusun laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyaluran tenaga kerja antar lokal, daerah dan antar negara termasuk pendeportasian TKI Illegal.
12. Perlindungan kepada calon TKI yang mempunyai Hak untuk memperoleh Perlindungan sesuai perundang-undangan (pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan).
13. Pelayanan rekomendasi dan perizinan di seksi penempatan dan perlindungan tenaga kerja.
14. Pelaksanaan Fasilitasi dan koordinasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja.
15. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi penempatan dan perlindungan tenaga kerja.
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Informasi dan Perluasan Tenaga Kerja.

Tugas pokok :

Membantu Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja dalam

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria. Pemberian bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lingkup Informasi dan Perluasan Tenaga Kerja.

Fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan seksi.
2. Penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Informasi dan Perluasan Tenaga Kerja.
3. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi Informasi dan Perluasan Tenaga Kerja.
4. Pengidentifikasian dan penyusunan rencana anggaran Informasi dan Perluasan Tenaga Kerja.
5. Penyiapan bahan penyusunan distem dan pedoman pembinaan informasi persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja.
6. Pengumpulan dan pengolahan data pencari kerja dan lowongan kerja perusahaan swasta.
7. Penyiapan bahan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan informasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pada lembaga pelatihan, instansi Pemerintah dan Swasta.
8. Penyiapan bahan sistem dan metode penyuluhan jabatan, analisa jabatan dan bimbingan jabatan.
9. Penyebarluasan informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik dan anjungan informasi.

10. Penganalisaan data ketenagakerjaan untuk bahan laporan mingguan, bulanan, dan tahunan, dan bahan sajian informasi kepada masyarakat.
11. Pelaksanaan monitoring dan penilaian pelaksanaan rencana dan kegiatan penyaluran tenaga kerja antar lokal, daerah dan antar negara termasuk pendeportasian TKI Illegal, penyaluran tenaga kerja pemuda dan wanita, tenaga kerja penyandang cacat dan usia lanjut.
12. Pengumpulan data informasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka teknologi tepat guna.
13. Penginventarisasian data/bahan penyusunan pedoman pengarahan, pendaftaran, seleksi dan menyebarkan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan teknologi tepat guna, tenaga kerjamandiri dan perluasan kerja.
14. Penyiapan bahan untuk seminar, rapat dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah maupun lembaga swasta untuk pengembangan /percontohan usaha mandiri.
15. Pelaksanaan pelayanan rekomendasi dan perizinan di seksi Informasi dan perluasan tenaga kerja.
16. Pelaksanaan Fasilitasi dan koordinasi Informasi dan perluasan tenaga kerja.
17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Informasi danperluasan tenaga kerja.
18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan rencana program kerja tahunan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- b. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitas dan koordinasi serta pembinaan teknis hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- d. Pemrosesan pengajuan usulan atau rekomendasi kebijakan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- e. Pelaksanaan pelayanan rekomendasi dan perizinan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan membawahi Seksi, antara lain:

- a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja;

Tugas pokok :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lingkup penyelesaian perselisihan tenaga kerja.

Fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan seksi.
Penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelesaian perselisihan tenaga kerja.
2. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi penyelesaian perselisihan tenaga kerja.
3. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis penyelesaian perselisihan tenaga kerja.
4. Pembinaan dan pemasyarakatan hubungan industrial bagi tenaga kerja dan perusahaan.
5. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediator hubungan industrial.
6. Pencegahan, penanggulangan, penanganan mogok kerja/atau unjuk rasa dan kasus *lock out* (penutupan perusahaan).

7. Pelaksanaan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di pengadilan dan di luar pengadilan.
8. Pelaksanaan pelayanan rekomendasi dan perizinan di seksi penyelesaian perselisihan tenaga kerja.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian perselisihan tenaga kerja.
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi penyelesaian perselisihan tenaga kerja.
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tugas pokok:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lingkup Seksi Persyaratan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan seksi.
2. Penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
4. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

5. Pelayanan administrasi pendaftaran/pencatatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama (PP/PKB), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWT/PKWTT).
 6. Pelayanan administrasi pendaftaran/pencatatan perusahaan dan pekerjaan bagi perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/perusahaan pemborongan pekerjaan dan sebagian pekerjaan.
 7. Pelayanan administrasi/pencatatan bagi tenaga kerja BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
 8. Pembinaan terhadap tenaga kerja dan perusahaan tentang ketentuan persyaratan kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
 9. Pelayanan rekomendasi dan peizinan di seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 10. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Seksi Pengupahan, Organisasi Pekerja dan Pengusaha.

Tugas pokok:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lingkup Seksi Pengupahan Organisasi Pekerja dan Pengusaha.

Fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan seksi.
2. Penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pengupahan Organisasi Pekerja dan Pengusaha.
3. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi Pengupahan Organisasi Pekerja dan Pengusaha.
4. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis Pengupahan Organisasi Pekerja dan Pengusaha.
5. Penyiapan dan melaksanakan program kerja Dewan Pengupahan, Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS Tripartit).
6. Pelaksanaan sosialisasi upah minimum bagi pekerja dan perusahaan.
7. Pencatatan dan pembinaan Organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha dan Lembaga Kerjasama (LKS Bipartit) ditingkat perusahaan.
8. Pembinaan terhadap tenaga kerja dan perusahaan tentang ketentuan pengupahan organisasi pekerja dan pengusaha.
9. Pelayanan rekomendasi dan perizinan di seksi Pengupahan Organisasi Pekerja dan Pengusaha.
10. Pelaksanaan pelatihan struktur dan skala upah bagi pengusaha dan pekerja.
11. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengupahan organisasi pekerjadan pengusaha.
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Pengupahan Organisasi Pekerja dan Pengusaha.
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok:

Merumuskan dan melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi Tingkat Kota.
- b. Penyusunan Rencana Program dan Petunjuk Teknis di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi Tingkat Kota.
- d. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi.
- e. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kota sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- f. Pembinaan Koperasi simpan pinjam (KSP) dan usaha simpan pinjam(USP) dalam wilayah kota.
- g. Penetapan kebijakan pemberdayaan usaha koperasi dalam menumbuhkan iklim usaha bagi usaha koperasi di tingkat kota.
- h. Pemberian fasilitasi Dana Bergulir.
- i. Pembinaan dan pengembangan usaha koperasi ditingkat kota.
- j. Pemberian fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha koperasi di tingkat kota.
- k. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan usaha koperasi

dalam wilayah kota.

- l. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha koperasi skala kota.
- m. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha koperasi skala kota.
- n. Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha, Kecil dan Menengah dalam penumbuhan iklim usaha kecil dan menengah di tingkat kota.
- o. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat kebutuhan pemenuhan dana, persaingan prasarana, informasi, kemitraan, perizinan, perlindungan, pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro di tingkat kota, produksi pemasaran, sumber daya manusia, teknologi.
- p. Pemberian fasilitasi akses penjaminan dalam penyesiaan pembiayaan bagi Usaha Mikro di tingkat kota meliputi kredit perbankan, penjaminan tenaga bukan bank, modal *ventura*, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah, jenis pembiayaan lain.
- q. Pengawasan, monitoring dan evaluasi usaha pemberdayaan Usaha Mikro dalam wilayah kota.
- r. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.
- s. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kota.
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro membawahi Seksi, antara lain :

- a. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi

Tugas pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di bidang Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi.

Fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis di bidang koperasi dan usaha mikro.
2. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis di bidang koperasi dan usaha mikro.
3. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang koperasi dan usaha mikro.
4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan tumbuhnya kader koperasi yang tangguh.
6. Pelaksanaan survei, pengumpulan data, pemetaan yang merupakan koperasi dalam pembinaan dan pengawasan koperasi.
7. Peningkatan Citra koperasi dengan membangun kepercayaan masyarakat, lembaga keuangan dan mitra bisnis koperasi.
8. Pengembangan peran serta masyarakat dan meningkatkan sinergi instansi pemerintah serta dunia usaha dalam pemberdayaan koperasi.
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi kelembagaan dan pengembangan koperasi serta pendukungnya.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Tugas pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

Fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana pogram dan petunjuk teknis untuk pembinaan sumber daya manusia.
2. Perencanaan dan perumusan kebijakan pembinaan pembinaan dan pengawasan usaha mikro.
3. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan dalam pengawasan usaha kecil dan menengah.
4. Pengaturan dan pembinaan pemanfaatan dalam pengawasan usaha mikro.
5. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pembinaan sumberdaya manusia.
6. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pembinaan sumber daya manusia.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Kemitraan Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro.

Tugas pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di bidang Kemitraan, Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana pogram kegiatan dan petunjuk teknis di seksi Kemitraan Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro.
2. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Kemitraan Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro.
3. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di seksi Kemitraan Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro.
4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
5. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Kemitraan Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang yaitu:

- a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
 1. Pelatihan Sablon dan percetakan.
 2. Pelatihan Menjahit dan Bordir.
 3. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari kerja Pemula.
 4. AK.1 On Line dan Website Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.
 5. Pelatihan Bengkel Motor.
 6. Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional.
 7. Pelatihan *Barbershop*.
 8. Pelatihan Salon kecantikan.

9. Pelatihan Pembuatan Kue Basah.
 10. Pelatihan Menjahit Tingkat Mahir.
 11. Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar.
 12. Pelatihan Membatik..
 13. Pelatihan Pembuatan Mebel
 14. Pelatihan Mengemudi.
 15. Pelatihan Pembuatan Kerupuk Ikan.
 16. Pelatihan Bengkel Las Teralis..
 17. Pelatihan Pembuatan Tanjak.
 18. Pelatihan Pembuatan Kuliner.
- b. Program peningkatan sumber daya manusia.
 1. Assesment dan Bimtek Tenaga Kerja Bidang Perhotelan..
 2. Assesment dan Bimtek Tenaga Kerja Bidang Instalasi Listrik
 - c. Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja.
 1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023.
 2. Bimtek Bursa Kerja Khusus (BKK).
 3. Identifikasi Tenaga Kerja di Perusahaan di Kota Tanjungpinang dan Bintan.
 4. *Job Fair*.
 - d. Program perlindungan dan pengembangan Lembaga ketenagakerjaan.
 1. Penunjang Operasional Sekretariat Dewan Pengupahan (DEPEKO) Tanjungpinang.
 2. Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS Tripartit) Kota Tanjungpinang.
 3. Pengembangan Wawasan Antar Daerah Bagi Lembaga Ketenagakerjaan.

4. Monitoring Penerapan Upah Minimum (UMK) bagi Pengusaha dan Pekerja.
 5. Pelaksanaan Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kota Tanjungpinang.
 6. Peningkatan Kualitas Struktur dan Skala Upah bagi pekerja dan pengusaha di KotaTanjungpinang.
 7. Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan.
 8. Peningkatan Kualitas Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
 9. *Coffie Morning* antar Pekerja , Serikat Pekerja, Perusahaan dan Pemerintah.
 10. Peningkatan Kapasitas Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial..
 11. Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 12. Pelayanan Administrasi dan Mediasi Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial.
 13. Pembinaan PKWT di Perusahaan di wilayah Kota Tanjungpinang.
 14. Pemantauan Deteksi Dini Kerawanan Hubungan Industrial pada Perusahaan.
- e. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi.
 2. Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi.
 3. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi.
 4. Kompetensi Bagi Pengurus Koperasi.
 5. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi.
 6. Pengembangan Wawasan Koperasi.
- f. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.

1. Fasilitasi KUR bagi Usaha Mikro (SIPK).
- g. Program pengembangan usaha skala mikro.
 1. Fasilitasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan.
 2. Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah.
 3. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah.
 4. Manajemen Pemasaran dan Peningkatan Kualitas Produk Usaha Mikro.
- h. Program pelayanan administrasi perkantoran.
 1. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan.
 2. Penyediaan jasa tenaga pendukung.
 3. Operasional Rutin Kantor
 - i. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
 1. Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga.
 - h. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
 1. Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan OPD.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini untuk mengukur kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang tahun 2018- 2019 dengan menggunakan tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Berikut ini analisis data yang digunakan pada tiap-tiap elemen.

a. Ekonomis

Kegiatan operasional dapat diukur bila mampu mengurangi munculnya biaya-biaya yang tidak diperlukan. Semakin kecil nilai rasio maka semakin ekonomis kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dalam penggunaan anggaran yang ditetapkan.

$$Ekonomis = \frac{input}{harga\ input\ (Rp)} \times 100\%$$

Keterangan:

Input : Realisasi anggaran atas kegiatan/program Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Harga *Input* : Anggaran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Berikut tabel pengukuran ekonomis pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dari tahun 2018 sampai tahun 2019.

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2019

Tahun	Anggaran Belanja Modal	Realisasi Anggaran Belanja Modal
2018	Rp. 193.375.000,-	Rp. 191.127.500,-
2019	Rp. 728.300.000,-	Rp. 650.310.500,-

Sumber: Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Pada tabel diatas realisasi anggaran belanja modal di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dari anggaran belanja modal dan realisasi belanja modal di tahun 2018, yaitu anggaran belanja modal sebesar Rp.

193.375.000,- yang terealisasikan dari belanja modal Rp.191.127.500. kemudian di tahun 2019 mengalami kenaikan dengan anggaran belanja modal yaitu sebesar Rp. 728.300.000,- yang terealisasikan dari anggaran belanja modal sebesar Rp. 650.310.500,-.

Tabel 4.2
Pengukuran Ekonomi Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2019

Tahun	Anggaran Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal	Ekonomis	Ket
2018	Rp. 193.375.000,-	Rp. 191.127.500,-	98,84%	Kurang Ekonomis
2019	Rp. 728.300.000,-	Rp. 650.310.500,-	89,29%	Cukup Ekonomis

Sumber: Data yang diolah 2018-2019.

Selanjutnya, pengukuran ekonomi mengenai beberapa program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pengukuran Ekonomi Program/Kegiatan Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Input Value (Rp)	Input (Rp)	Ekonomis (%)	Ket
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,750,420,000	1,536,485,245	87,78	Cukup Ekonomis
2.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	574,650,000	542,726,608	94,44	Kurang Ekonomis
3.	Operasional Rutin Kantor	956,985,750	889,721,763	92,97	Kurang Ekonomis
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
4.	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	193,375,000	191,127,500	98,84	Kurang Ekonomis

C.	Peningkatan Daya Saing SDM Usaha Mikro				
5.	Peningkatan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro	191,779,500	158,009,400	82,39	Cukup Ekonomis
D.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				
6.	Pelatihan Sablon	187,400,000	181,972,209	97,1	Kurang Ekonomis
7.	Pelatihan dan Sertifikasi Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan	49,848,300	47,087,790	94,46	Kurang Ekonomis
8.	Pelatihan Pangkas Rambut Barber Shop	174,369,000	0,00	0,00	-
E.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan				
9.	Penunjang Operasional Sekretariat Dewan Pengupahan (DEPEKO)	458,526,000	318,852,832	69,54	Ekonomis
10.	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS Tripartit) Kota Tanjungpinang	350,829,000	253,623,600	72,29	Ekonomis
11.	Pengembangan Wawasan antar Daerah bagi Lembaga Ketenagakerjaan	100,000,000	52,905,000	52,91	Sangat Ekonomis
12.	Peningkatan Kualitas Struktur dan Skala Upah bagi Pekerja dan Pengusaha	101,290,000	94,749,878	93,54	Kurang Ekonomis
F.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
13.	Pengembangan wawasan koperasi	114,535,000	108,484,600	94,72	Kurang Ekonomis
14.	Pembentukan Kader - kader Koperasi	123,300,000	112,077,000	90,90	Kurang Ekonomis
	Rata-rata	5,152,938,550	4,487,823,425	87,09	Cukup Ekonomis

Sumber: Data yang diolah, 2018.

Tabel 4. 4
Pengukuran Ekonomis Program/Kegiatan Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	<i>Input Value</i> (Rp)	<i>Input</i> (Rp)	Ekonomis (%)	Ket
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,500,000,000	1,255,292,054	83.69	Cukup Ekonomis
2.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	516,600,000	448,540,810	86.83	Cukup Ekonomis
3.	Operasional Rutin Kantor	898,450,000	789,910,958	87.92	Cukup Ekonomis
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
4.	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	562,800,000	492,158,000	87.45	Cukup Ekonomis
C.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.				
5.	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program Kegiatan OPD	10,000,000	0.00	0.00	-
D.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				
6.	Penunjang Operasional Sekretariat Dewan Pengupahan (DEPEKO)	269,635,000	239,853,250	88.95	Cukup Ekonomis
7.	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS Tripartit) Kota Tanjungpinang	244,897,500	222,224,843	90.74	Kurang Ekonomis
8.	Pengembangan Wawasan antar Daerah bagi Lembaga Ketenagakerjaan	106,180,000	86,360,700	81.33	Cukup Ekonomis
E.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				
9.	Pelatihan Pangkas Rambut Pria	209,265,000	198,586,210	94.90	Kurang Ekonomis
10.	Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional	151.485.000	150,064,400	99.00	Kurang Ekonomis

11.	Pelatihan kewirausahaan Bagi Pencari Kerja Pemula	74.685.000	58,848,600	78.80	Ekonomis
12.	AK1 On line dan Website Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro	144,500,000	133,569,752	92.44	Kurang Ekonomis
13.	Pelatihan Menjahit dan Brodir	233,775,000	230,696,950	98.68	Kurang Ekonomis
F.	Program Perluasan Rencana Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang				
14.	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang	122,730,000	107,234,147	87.37	Cukup Ekonomis
G.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
15.	Peningkatan Kualitas SDM untuk Manajemen Pengelolaan Koperasi Antar Daerah	223,659,000	218,228,500	97.57	Kurang Ekonomis
16.	Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi	140,610,000	134,098,964	95.37	Kurang Ekonomis
H.	Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM				
17.	Fasilitasi KUR Bagi Usaha Mikro (SIKP)	141,235,000	117,033,700	82.86	Cukup Ekonomis
I.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				
18.	Sertifikasi Tenaga Kerja di Bidang Pariwisata	130,165,000	112,438,101	86.38	Cukup Ekonomis
19.	Sertifikasi Tenaga Kerja di Bidang Kelistrikan	128,965,000	113,049,755	87.66	Cukup Ekonomis
	Rata-rata	5,809,636,500	5,108,189,694	87.93	Cukup Ekonomis

Sumber: Data yang diolah, 2019.

Berdasarkan hasil pengukuran ekonomi yang telah dianalisis oleh penulis mengenai kinerja dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Di tahun 2018 memiliki 14 program/kegiatan yang telah dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Tabel 4.5
Hasil Pengukuran Ekonomi Tahun 2018

Kriteria	Program/Kegiatan	Rata-rata
Tidak Ekonomis	-	-
Kurang Ekonomis	8	94,62
Cukup Ekonomis	2	85,09
Ekonomis	2	70,92
Sangat Ekonomis	1	52,91
Tidak Dilaksanakan	1	-
Total	14	-

2. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang. Di tahun 2019 memiliki 19 kegiatan/program yang telah dilakukan pada

Tabel 4.6
Hasil Pengukuran Ekonomis Tahun 2019

Kriteria	Program/Kegiatan	Rata-rata
Tidak Ekonomis	-	-
Kurang Ekonomis	7	95,53
Cukup Ekonomis	10	86,04
Ekonomis	1	78,80
Sangat Ekonomis	-	-
Tidak Dilaksanakan	1	-
Total	19	-

Berikut hasil perbandingan dari pengukuran ekonomis pada tahun 2018 hingga 2019 terhadap program/kegiatan yang telah dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Tabel 4.7
Perbandingan Pengukuran Ekonomis
Tahun 2018 dan 2019

Kriteria	Tahun 2018	Tahun 2019
Tidak Ekonomis	-	-
Kurang Ekonomis	8	7
Cukup Ekonomis	2	10
Ekonomis	2	1
Sangat Ekonomis	1	-
Tidak Dilaksanakan	1	1
Rata-rata	87,09%	87,93%

b. Efisiensi

Efisiensi diukur dengan membandingkan antara output pada input yang dikaitkan dengan target yang telah ditetapkan. Jika semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

$$Efisiensi = \frac{output}{input} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : Presentase hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan.

Input : Presentase dari nilai ekonomi.

Berikut tabel pengukuran efisiensi pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dari tahun 2018 sampai tahun 2019.

Tabel 4.8
Anggaran Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2018 sampai 2019

Tahun	Anggaran Belanja Operasional	Realisasi Belanja Operasional
2018	Rp. 5.152.938.500,-	Rp. 4.486.507.925,-
2019	Rp. 8.871.782.141,-	Rp. 8.238.187.885,-

Sumber: Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Tabel diatas menunjukkan mengenai belanja dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro dari anggaran belanja operasional yang realisasi belanja operasionalnya mengalami peningkatan. Adapun di tahun 2018 realisasi anggaran belanja operasional, yaitu anggaran belanja operasional sebesar Rp. 5.152.938.500,- yang terealisasikan dari belanja operasional sebesar Rp. 4.486.507.925,- kemudian di tahun 2019 anggaran belanja operasional yaitu sebesar Rp. 8.871.782.141,- yang terealisasikan dari anggaran belanja operasional

sebesar Rp. 8.238.187.885,-

Tabel 4.9
Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2019

Tahun	Anggaran Belanja Operasional	Realisasi Belanja Operasional	Efisiensi	Ket
2018	Rp. 5.152.938.500,-	Rp. 4.486.507.925,-	87,07%	Cukup Efisien
2019	Rp. 8.871.782.141,-	Rp. 8.238.187.885,-	92,86%	Efisien

Sumber: data yang diolah 2018-2019.

Selanjutnya, pengukuran efisiensi mengenai beberapa program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel 4.10
Pengukuran Efisiensi Pada Program/Kegiatan Tahun 2018

No.	Kegiatan/Program	Output	Input	Efisiensi	Ket
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100,00	87,78	113,97	Sangat Efisien
2.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	100,00	94,44	105,89	Sangat Efisien
3.	Operasional Rutin Kantor	100,00	92,97	107,56	Sangat Efisien
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
4.	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	100,00	98,84	101,17	Sangat Efisien
C.	Peningkatan Daya Saing SDM Usaha Mikro				
5.	Peningkatan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro	100,00	82,39	121,37	Sangat Efisien
D.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				
6.	Pelatihan Sablon	100,00	97,1	102,99	Sangat Efisien
7.	Pelatihan dan Sertifikasi Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan	100,00	94,46	105,86	Sangat Efisien
8.	Pelatihan Pangkas Rambut Barber Shop	0,00	0,00	0,00	Tidak Efisien

E.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan				
9.	Penunjang Operasional Sekretariat Dewan Pengupahan (DEPEKO)	100,00	69,54	143,80	Sangat Efisien
10.	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS Tripartit) Kota Tanjungpinang	100,00	72,29	138,33	Sangat Efisien
11.	Pengembangan Wawasan antar Daerah bagi Lembaga Ketenagakerjaan	100,00	52,91	189,00	Sangat Efisien
12.	Peningkatan Kualitas Struktur dan Skala Upah bagi Pekerja dan Pengusaha	100,00	93,54	106,91	Sangat Efisien
F.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
13.	Pengembangan wawasan koperasi	100,00	94,72	105,57	Sangat Efisien
14.	Pembentukan Kader - kader Koperasi	100,00	90,90	110,01	Sangat Efisien
	Rata-rata	92,86	80,13	115,89	Sangat Efisien

Sumber: data yang diolah, 2018.

Tabel 4. 11
Pengukuran Efisiensi Pada Program/Kegiatan Tahun 2019

No.	Kegiatan/Program	Output	Input	Efisiensi	Ket
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100,00	83.69	119,49	Sangat Efisien
2.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	100,00	86.83	115,77	Sangat Efisien
3.	Operasional Rutin Kantor	100,00	87.92	113,74	Sangat Efisien
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
4.	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	100,00	87.45	114,35	Sangat Efisien
C.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.				
5.	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program Kegiatan OPD	-	-	-	Tidak Efisien

D.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				
6.	Penunjang Operasional Sekretariat Dewan Pengupahan (DEPEKO)	100,00	88.95	112,42	Sangat Efisien
7.	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS Tripartit) Kota Tanjungpinang	100,00	90.74	110,53	Sangat Efisien
8.	Pengembangan Wawasan antar Daerah bagi Lembaga Ketenagakerjaan	100,00	81.33	122,96	Sangat Efisien
E.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				
9.	Pelatihan Pangkas Rambut Pria	95,00	94.90	100,11	Sangat Efisien
10.	Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional	99,00	99.00	100,00	Efisien
11.	Pelatihan kewirausahaan Bagi Pencari Kerja Pemula	95,00	78.80	120,56	Sangat Efisien
12.	AK1 On line dan Website Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro	100,00	92.44	108,18	Sangat Efisien
13.	Pelatihan Menjahit dan Brodir	100,00	98.68	101,34	Sangat Efisien
F.	Program Perluasan Rencana Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang				
14.	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang	100,00	87.37	114,46	Sangat Efisien
G.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
15.	Peningkatan Kualitas SDM untuk Manajemen Pengelolaan Koperasi Antar Daerah	100,00	97.57	102,49	Sangat Efisien
16.	Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi	100,00	95.37	100,85	Sangat Efisien
H.	Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM				
17.	Fasilitasi KUR Bagi Usaha Mikro (SIKP)	100,00	82.86	120,69	Sangat Efisien

I.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				
18.	Sertifikasi Tenaga Kerja di Bidang Pariwisata	86,00	86.38	99,56	Efisien
19.	Sertifikasi Tenaga Kerja di Bidang Kelistrikan	86,88	87.66	99,11	Efisien
	Rata-rata	92,73	84,63	109,57	Sangat Efisien

Sumber: data yang diolah, 2019.

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi yang telah dianalisis oleh penulis mengenai kinerja dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Di tahun 2018 memiliki 14 program/kegiatan yang telah dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Tabel 4.12
Hasil Pengukuran Efisiensi Tahun 2018

Kriteria	Kegiatan/Program	Rata-rata
Tidak Efisien	1	-
Kurang Efisien	-	-
Cukup Efisien	-	-
Efisien	-	-
Sangat Efisien	13	119,41
Total	14	-

2. Di tahun 2019 memiliki 19 program/kegiatan yang telah dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Tabel 4.13
Hasil Pengukuran Efisiensi Tahun 2019

Kriteria	Kegiatan/Program	Rata-rata
Tidak Efisien	1	-
Kurang Efisien	-	-
Cukup Efisien	-	-
Efisien	3	99,56
Sangat Efisien	15	111,86
Total	19	-

Berikut hasil perbandingan dari pengukuran efisiensi pada tahun 2018 hingga 2019 terhadap program/kegiatan yang telah dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Tabel 4.14
Perbandingan Pengukuran Efisiensi
Tahun 2018 dan 2019

Kriteria	Tahun 2018	Tahun 2019
Tidak Efisien	1	1
Kurang Efisien	-	-
Cukup Efisien	-	-
Efisien	-	3
Sangat Efisien	13	15
Rata-rata	115,89%	109,57%

c. Efektifitas

Efektifitas merupakan suatu pengukuran memperoleh tingkat pencapaian pada hasil program yang telah ditargetkan dengan melakukan perbandingan antara outcome dengan output. Kinerja pada program/kegiatan dapat dikatakan efektif jika output lebih besar dibanding outcome, artinya hasil yang telah dicapai mampu melebihi dari tujuan atau target yang akan dicapai.

$$Efektifitas = \frac{outcomes}{output} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome : Presentase realisasi dari kegiatan

Output : Presentase hasil yang diperoleh dari kegiatan

Pada Dinas Tenaga kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang tidak memiliki pendapatan, namun pengukuran ini dapat diukur melalui beberapa program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh dinas tersebut. Berikut tabel

pengukuran efektifitas pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Tabel 4.15
Pengukuran Efektivitas Program/Kegiatan Tahun 2018

No.	Program/Kegiatan	Output	Outcome	Efektivitas	Ket
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100,00	87,78	87,78	Cukup Efektif
2.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	100,00	94,44	94,44	Efektif
3.	Operasional Rutin Kantor	100,00	92,97	92,97	Efektif
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
4.	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	100,00	98,84	98,84	Efektif
C.	Peningkatan Daya Saing SDM Usaha Mikro				
5.	Peningkatan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro	100,00	82,39	82,39	Cukup Efektif
D.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				
6.	Pelatihan Sablon	100,00	97,10	97,10	Efektif
7.	Pelatihan dan Sertifikasi Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan	100,00	94,46	94,46	Efektif
8.	Pelatihan Pangkas Rambut Barber Shop	95,00	0,00	0,00	Tidak Efektif
E.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan				
9.	Penunjang Operasional Sekretariat Dewan Pengupahan (DEPEKO)	100,00	69,54	69,54	Kurang Efektif
10.	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS Tripartit) Kota Tanjungpinang	100,00	72,29	72,29	Kurang Efektif
11.	Pengembangan Wawasan antar Daerah bagi Lembaga Ketenagakerjaan	100,00	52,91	52,91	Tidak Efektif
12.	Peningkatan Kualitas Struktur dan Skala Upah bagi Pekerja	100,00	93,54	93,54	Efektif

	dan Pengusaha				
F.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
13.	Pengembangan wawasan koperasi	100,00	94,72	94,72	Efektif
14.	Pembentukan Kader - kader Koperasi	100,00	90,90	90,90	Efektif
	Rata-rata	99,64	83,50	83,80	Cukup Efektif

Sumber: Data yang diolah, 2018.

Tabel 4.16
Pengukuran Efektivitas Pada Program/Kegiatan Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	Output	Outcome	Efektivitas	Ket
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100,00	100,00	100,00	Efektif
2.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	100,00	100,00	100,00	Efektif
3.	Operasional Rutin Kantor	100,00	100,00	100,00	Efektif
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
4.	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	100,00	100,00	100,00	Efektif
C.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.				
5.	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program Kegiatan OPD	85,00	-	-	Tidak Efektif
D.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				
6.	Penunjang Operasional Sekretariat Dewan Pengupahan (DEPEKO)	100,00	100,00	100,00	Efektif
7.	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS Tripartit) Kota Tanjungpinang	100,00	100,00	100,00	Efektif
8.	Pengembangan Wawasan antar Daerah bagi Lembaga Ketenagakerjaan	100,00	100,00	100,00	Efektif
E.	Program Peningkatan				

	Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				
9.	Pelatihan Pangkas Rambut Pria	95,00	94,90	99,89	Efektif
10.	Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional	99,00	99,00	100,00	Efektif
11.	Pelatihan kewirausahaan Bagi Pencari Kerja Pemula	95,00	95,00	100,00	Efektif
12.	AK1 On line dan Website Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro	100,00	100,00	100,00	Efektif
13.	Pelatihan Menjahit dan Brodir	100,00	100,00	100,00	Efektif
F.	Program Perluasan Rencana Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang				
14.	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang	100,00	100,00	100,00	Efektif
G.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
15.	Peningkatan Kualitas SDM untuk Manajemen Pengelolaan Koperasi Antar Daerah	100,00	100,00	100,00	Efektif
16.	Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi	100,00	100,00	100,00	Efektif
H.	Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM				
17.	Fasilitasi KUR Bagi Usaha Mikro (SIKP)	100,00	100,00	100,00	Efektif
I.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				
18.	Sertifikasi Tenaga Kerja di Bidang Pariwisata	86,00	86,38	100,44	Sangat Efektif
19.	Sertifikasi Tenaga Kerja di Bidang Kelistrikan	88,00	87,66	99,61	Efektif
	Rata-rata	97,26	92,79	95,40	Efektif

Sumber: Data yang diolah, 2019.

Berdasarkan hasil pengukuran efektivitas yang telah dianalisis oleh penulis mengenai kinerja dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Tanjungpinang, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Di tahun 2018 memiliki 14 program/kegiatan yang telah dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Tabel 4.17
Hasil Pengukuran Efektivitas Tahun 2018

Kriteria	Kegiatan/Program	Rata-rata
Tidak Efektif	2	26,46
Kurang Efektif	2	70,92
Cukup Efektif	2	85,09
Efektif	8	94,62
Sangat Efektif	-	-
Total	14	-

2. Di tahun 2019 memiliki 19 program/kegiatan yang telah dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Tabel 4.18
Hasil Pengukuran Efektivitas Tahun 2019

Kriteria	Kegiatan/Program	Rata-rata
Tidak Efektif	1	-
Kurang Efektif	-	-
Cukup Efektif	-	-
Efektif	17	99,97
Sangat Efektif	1	100,40
Total	19	-

Berikut hasil perbandingan dari pengukuran efektivitas pada tahun 2018 hingga 2019 terhadap program/kegiatan yang telah dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Tabel 4.19
Perbandingan Pengukuran Efektivitas
Tahun 2018 dan 2019

Kriteria	Tahun 2018	Tahun 2019
Tidak Efektif	2	1
Kurang Efektif	2	-
Cukup Efektif	2	-
Efektif	8	17
Sangat Efektif	-	1
Rata-rata	83,80%	95,40%

4.3 Pembahasan

Berdasarkan pengukuran dengan menggunakan *value for money* terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang melalui nilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, maka penulis dapat menyimpulkan hasil pengukuran tersebut sebagai berikut:

1. Ekonomi

Pada pengukuran ekonomis dalam realisasi anggaran belanja di tahun 2018. Hasil pengukurannya telah memperoleh anggaran belanja modal pada dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro pada tahun 2018 sebesar Rp. 193.375.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 191.127.500,- dengan capaian nilai kriteria kurang ekonomis yaitu presentase 98,84%. Sedangkan, anggaran belanja dan realisasi pada tahun 2019 memperoleh anggaran belanja modal pada dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro tahun 2019 telah mengalami peningkatan sebesar Rp. 728.300.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 650.310.500,- dengan capaian kriteria nilai cukup ekonomis pada presentase 89,29%.

Selanjutnya, pada hasil pengukuran ekonomis terhadap kegiatan/program di tahun 2018, kegiatan/program yang telah dilaksanakan memiliki capaian nilai rata-

rata cukup ekonomis dari 14 kegiatan. Dengan rincian pada 8 kegiatan/program yang mencapai nilai rata-rata kurang ekonomis yaitu persentase 94,62%. ada 2 program/kegiatan dengan capaian nilai cukup ekonomis yaitu penyediaan jasa administrasi keuangan dan peningkatan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro dengan rata-rata persentase 85,09%. Selain itu, ada 2 program/kegiatan yang mencapai nilai ekonomis dengan capaian rata-rata presentase 70,92% dan 1 program/kegiatan dengan capaian nilai sangat ekonomis yaitu dengan capaian rata-rata presentase 52,91%. Namun terdapat 1 program yang tidak terlaksanakan. Kesimpulan dari hasil pengukuran ekonomis ditahun 2018 yaitu 14 kegiatan/program mencapai nilai rata-rata cukup ekonomis dengan persentase 87,09% artinya anggaran untuk seluruh kegiatan ini Rp.5.152.938.550 yang terealisasi Rp.4.487.823.425 menunjukkan bahwa telah melakukan penghematan sebesar Rp.665.115.125.

Pada tahun 2019 hasil pengukuran ekonomis pada program/kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai nilai rata-rata cukup ekonomis dari 19 program/kegiatan yang memiliki rincian 7 kegiatan/program dengan capaian nilai rata-rata kurang ekonomis pada persentase 95,53% dan 10 program/kegiatan mencapai nilai cukup ekonomis dengan persentase rata-rata 86,04% serta 1 program/kegiatan yang mencapai nilai ekonomis yaitu pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja pemula dengan persentase 78,80% dan hanya 1 program/kegiatan yang mencapai nilai ekonomis yaitu pada kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program Kegiatan OPD. Kesimpulan dari hasil pengukuran ekonomis di tahun 2019 pada 19 kegiatan yang diperoleh capaian nilai

rata-rata kurang ekonomis yaitu persentase 87,93% dengan anggaran pada seluruh kegiatan sebesar Rp.5.809.631,500 yang terealisasi sebesar Rp.5.108.189.694 .- hal ini menunjukkan bahwa telah melakukan penghematan sebesar Rp.701,441,806.-

Berdasarkan hasil perbandingannya, program/kegiatan yang telah mencapai nilai cukup ekonomis di tahun 2018 dengan 14 kegiatan dan di tahun 2019 dengan 19 kegiatan yang memiliki capaian nilai juga cukup ekonomis. Di tahun 2018 program/kegiatan dengan capaian nilai cukup ekonomis yaitu persentase 87,09%, dan tahun 2019 program/kegiatan dengan capaian nilai juga cukup ekonomis yaitu persentase 87,93%. Artinya penggunaan dana anggaran dalam penghematan terhadap munculnya biaya-biaya yang tidak diperlukan di tahun 2018 lebih baik dibandingkan tahun 2019 walaupun selisih penghematannya hanya sedikit. Artinya, kinerja keuangan di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang belum seluruhnya mampu untuk mengelola keuangan dalam penghematan anggaran yang baik.

2. Efisiensi

Pada pengukuran dari hasil efisiensi pada anggaran belanja operasional di tahun 2018-2019. Jumlah dari anggaran belanja operasional di tahun 2018 sebesar Rp. 5.152.938.500,- yang dianggarkan. Dan anggaran belanja oprasional yang terealisasi di tahun 2018 sebesar Rp. 4.486.507.925,- dengan capaian nilai kriteria cukup efisien yaitu presentase 87,07% yang hal ini bahwa kinerja di dinas tenaga kerja koperasi dan usaha mikro di tahun 2018 dinyatakan cukup efisien. Sedangkan anggaran belanja operasional di tahun 2019 sebesar Rp.

8.871.782.141,- yang dianggarkan. Dan anggaran belanja oprasional yang terealisasikan sebesar Rp. 8.238.187.885,- dengan capaian nilai kriteria efisien pada presentase 92,86%. Hasil penelitian ini dapat diartikan efisien apabila kriteria persentase efisien ini masuk dalam kriteria (90-100%).

Selanjutnya mengenai hasil pengukuran efisiensi pada program/kegiatan di tahun 2018, program/kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2018 yaitu ada 13 kegiatan capaian kriteria nilai sangat efisien pada persentase 119,41%. Dari 14 Program/kegiatan yang memiliki capaian nilai persentase tertinggi adalah pengembangan wawasan antar daerah bagi lembaga ketenagakerjaan pada presentase 189,00% dan program/kegiatan dengan capaian nilai terendah adalah pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga dengan persentase 101,17%, namun terdapat 1 kegiatan yang tidak terlaksanakan yaitu pelatihan pangkas rambut barber shop. Kesimpulan dari hasil pengukuran efisiensi di tahun 2018 dari 14 program/kegiatan dengan capaian nilai rata-rata kriteria efisien pada persentase 115,89%.

Hasil pengukuran efisiensi pada kegiatan/program di tahun 2019, program/kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019 sebanyak 19 kegiatan dengan capaian kriteria nilai rata-rata efisien pada rincian 15 program/kegiatan mencapai nilai rata-rata yaitu sangat efisien dengan persentase 111,86% dan 3 program/kegiatan dengan capaian yaitu nilai rata-rata efisien pada persentase 99,56%. Program/kegiatan yang memperoleh persentase tertinggi adalah pengembangan wawasan antar daerah bagi lembaga ketenagakerjaan dengan persentase 122,96% serta pogram/kegiatan yang memperoleh presentase terendah

adalah sertifikasi tenaga kerja di bidang kelistrikan dengan persentase 99,11%, dan ada 1 program/kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan. Kesimpulan dari hasil pengukuran efisiensi di tahun 2019 dari 19 kegiatan memiliki capaian dengan nilai rata-rata sangat efisien yaitu persentase 109,57%.

Jika dilihat dari hasil perbandingannya mengenai pengukuran efisiensi di tahun 2018 dan tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa tahun 2018 ada 14 program/kegiatan dengan capaian nilai rata-rata sangat efisien pada persentase 115,89%. Dan di tahun 2019 dengan 19 program/kegiatan juga juga mencapai nilai rata-rata sangat efisien pada persentase 109,57%. Hal ini menunjukkan bahwa output yang diperoleh secara optimal dengan input yang serendah mungkin, maka diperoleh hasil nilai efisien lebih dari 100%.

3. Efektivitas

Pada dinas Tenaga kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang tidak memiliki pendapatan, namun pengukuran ini dapat diukur melalui beberapa program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh dinas tersebut.

Berdasarkan hasil pengukuran efektivitas pada program/kegiatan di tahun 2018, program/kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2018 yaitu ada 14 program/kegiatan dengan capaian kriteria yaitu nilai rata-rata cukup efektif dengan rincian 8 program/kegiatan yang mencapai nilai rata-rata efektif pada persentase 94,62%, dan 2 program/kegiatan dengan capaian nilai rata-rata cukup efektif yaitu persentase 85,09%. Serta 2 program/kegiatan dengan mencapai nilai rata-rata kurang efektif dengan persentase 70,92 %. Namun, dari 14 program/kegiatan terdapat 2 kegiatan yaitu pelatihan pangkas rambut barber shop dan pengembangan

wawasan antar daerah bagi lembaga ketenagakerjaan dengan capaian nilai tidak efektif. Kesimpulan dari hasil pengukuran efektivitas di tahun 2018 dari 14 kegiatan/program memiliki capaian dengan nilai rata-rata cukup efektif yaitu persentase 83,80%.

Sedangkan, hasil pengukuran efektivitas dalam program/kegiatan di tahun 2019, program/kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2019 terdiri dari 19 program/kegiatan yang mencapai pada kriteria nilai rata-rata efektif dengan rincian 17 program/kegiatan yang memiliki capaian nilai rata-rata efektif yaitu persentase 99,97% dan ada 1 program/kegiatan memperoleh capaian nilai rata-rata sangat efektif yaitu sertifikasi tenaga kerja di bidang pariwisata dengan persentase 100,40%. Namun, ada 1 program/kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga kegiatan yang seharusnya sudah ditargetkan menjadi tidak efektif. Kesimpulan dari hasil pengukuran efektivitas di tahun 2019 dari 19 kegiatan/program memperoleh capaian dengan nilai rata-rata efektif pada persentase 95,40%.

Dari perbandingan mengenai pengukuran data yang telah dilakukan, di tahun 2018 memiliki 14 program/kegiatan yang dilaksanakan dengan rincian 2 program/kegiatan dengan capaian hasil kriteria nilai kurang efektif. Kemudian 2 program/kegiatan kriteria yang dicapai dengan nilai cukup efektif dan 9 program/kegiatan memperoleh capaian nilai dengan kriteria efektif, tetapi ada 1 program/kegiatan mencapai nilai tidak efektif. Di tahun 2019 terdapat 19 program/kegiatan yang dilakukan yaitu 17 kegiatan dengan hasil capaian pada kriteria nilai efektif, dan 1 program/kegiatan yang memperoleh nilai capaian yaitu sangat efektif. Namun, di tahun 2018 juga masih ada 1 program/kegiatan yang tidak

dilaksanakan sehingga memperoleh nilai capaian dengan kriteria tidak efektif. Kesimpulan hasil pengukuran efektivitas di tahun 2018 dari 14 program/kegiatan memperoleh nilai rata-rata cukup efektif yaitu persentase 83,80% sedangkan di tahun 2019 dari 19 program/kegiatan menghasilkan pencapaian pada nilai rata-rata efektif dengan persentase 95,40%, jika dilihat dari efektif pada kedua tahun tersebut maka di tahun 2019 lebih efektif dibandingkan tahun 2018.

Hal ini sejalan dengan konsep teori *value for money* yang menunjukkan bahwa penghitungannya sangat berkaitan erat pada kinerja suatu organisasi, yang terdapat tiga elemen penting digunakan dalam mengukur kinerja yaitu elemen ekonomi, efisien, dan efektivitas. Dengan menggunakan pengukuran kinerja pada konsep *value for money*, maka dapat diukur kemampuan kinerjanya terhadap program/kegiatan yang sudah terencanakan. Sehingga dapat dilihat tingkatan ekonomi, efektif, dan efisien disuatu organisasi tersebut.

Berdasarkan dari hasil pengukuran dari ketiga elemen *value for money* menunjukkan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana maupun memperoleh dampak yang sangat rendah sehingga menjadi tidak efektif, diantaranya yang disebabkan karena (LKPJ Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang):

1. Kegiatan pelatihan pangkas rambut *barber shop*, hal ini dikarenakan tidak tersedianya dana pada pemerintah kota dikarenakan telah mengalami defisit anggaran dan tidak tersalurkan ke masing-masing OPD sehingga Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang harus mengefisiensi penyerapan dana anggarannya.

2. Kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program kegiatan OPD disebabkan karena kurangnya persiapan terhadap indikator kinerja yang perlu direvisi dengan target menunjang kinerja perencanaan pada program/kegiatan sehingga masih menimbulkan banyaknya pengusulan baik dalam penyerapan dana anggaran dikarenakan dana yang tersedia juga tidak mendukung, yang seharusnya dipertimbangkan untuk ditambah dalam mencapai target indikator.
3. Dampak jumlah koperasi aktif dengan capaian target indikator jumlah koperasi aktif sangat rendah yang seharusnya ditargetkan ada 330 namun yang terealisasi hanya 140 koperasi aktif disebabkan karena adanya pemberlakuan kebijakan oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mewajibkan memberlakukan Sertifikat (NIK) Nomor Induk Koperasi.
4. Belum terakreditasinya lembaga pelatihan kerja (Negeri dan Swasta) yang berakibat menjadi belum optimalnya kualitas lulusan pelatihan kerja, rendahnya produktivitas, etos kerja.
5. Masih rendahnya kesadaran para pengusaha akan pelaksanaan norma ketenagakerjaan termasuk pelanggaran UMK di beberapa perusahaan.

Berikut ini adalah tabel dari hasil penelitian pengukuran *value for money* tahun 2018 sampai 2019:

Tabel 4.20
Hasil Rekap Pengukuran *Value for Money* Pada Program/Kegiatan Dinas
Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang
Tahun 2018 Sampai 2019

Tahun	Ekonomi	Efisien	Efektif
2018	87,09%	115,89%	83,80%
2019	87,93%	109,57%	95,40%
Hasil	87,51%	112,73%	89,60%

Sumber: Data yang diolah, 2018-2019.

Dari hasil rekap pengukuran tabel diatas, menunjukkan bahwa pengukuran ekonomi pada program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang tahun 2018 sampai dengan 2019 memperoleh capaian hasil dengan kriteria cukup ekonomis yaitu presentase 87,51%. Untuk pengukuran efisiensi pada program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang tahun 2018 sampai dengan 2019 telah mencapai hasil presentase 112,73% dengan kriteria efisien. Dan untuk pengukuran efektivitas pada program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang tahun 2018 sampai dengan 2019 dapat tercapai dengan hasil presentase 89,60%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerjanya cukup efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran dengan menggunakan analisis value for money yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang di tahun 2018 hingga 2019 jika dilihat dari elemen ekonomis, efisiensi dan efektivitas yaitu sebagai berikut:

1. Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang di tahun 2018 hingga 2019 ditinjau dari pengukuran ekonomi menunjukkan hasil cukup ekonomis. Dari pengukuran nilai ekonomis di tahun 2018 dari 14 program/kegiatan telah memperoleh capaian dengan nilai rata-rata cukup ekonomis yaitu 87,09% dan di tahun 2019 dari 19 program/kegiatan telah mencapai dengan nilai rata-rata juga cukup ekonomis yaitu 87,93%.
2. Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang di tahun 2018 hingga 2019 ditinjau dari pengukuran efisiensi menunjukkan hasil efisien artinya output yang dimiliki lebih besar dibanding input. Dari pengukuran nilai efisiensi di tahun 2018 dari 14 program/kegiatan telah memperoleh capaian dengan nilai rata-rata efisien yaitu 115,89% dan begitu juga di tahun 2019 dari 19 program/kegiatan telah mencapai dengan nilai rata-rata efisiensi yaitu 109,57%. Namun terdapat dua kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga hasil capaiannya tidak efisien.

3. Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang di tahun 2018 hingga 2019 ditinjau dari pengukuran efektivitas menunjukkan hasil cukup efektif. Dari pengukuran efektivitas pada tahun 2018 dari 14 program/kegiatan dengan hasil capaian kriteria nilai rata-rata cukup efektif yaitu 83,80% dan di tahun 2019 dari 19 program/kegiatan telah mencapai nilai kriteria rata-rata efektif 95,40%. Namun terdapat dua kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga hasil capaiannya tidak efisien.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, Adapun beberapa saran yang diberikan penulis agar memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang agar bisa meningkatkan kembali untuk kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya, baik pada program/kegiatan yang telah direncanakan maupun dalam penyusunan anggaran agar lebih terinci mengenai data-datanya sehingga dapat dievaluasi secara matang dan tidak ada lagi program/kegiatan yang sudah ditargetkan namun tidak dilaksanakan.
2. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang diharapkan bisa membuat pelaksanaan suatu program/kegiatan yang tepat sasaran sehingga dampaknya dapat terlihat dengan sesuai.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah teknik dalam pengumpulan data serta menganalisis data menggunakan analisis data tematik, agar memperoleh informasi yang lebih dalam jika ada terdapat program/kegiatan yang tidak dijalankan dan tidak hanya menggunakan tiga elemen

saja namun dengan menambahkan elemen lainnya yaitu kesetaraan (*equality*) dan keadilan (*equity*).

4. Dalam menentukan outcome, sebaiknya peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode lain, seperti menyebarkan kuesioner agar bisa mengetahui tingkat kepuasan secara riil terhadap pelayanan suatu instansi



DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, Demi Aulia. (2014). *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011 – 2012*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Arisaudi, Zakia. (2016). *Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Value For Money Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang*. Skripsi. Universitas Muhamadiyah, Palembang, Indonesia.
- Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang. <https://disnakerkopum.tanjungpinangkota.go.id/>
- Halim, Abdul, & Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Edisi ke-2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herdiansyah, Haris, (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Husna, Yulia Nurhanifah. (2020). *Analisis Value for Money Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Periode 2017-2018*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri, Payakumbuh.
- Indriyani, Khairunnisa. (2018). *Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value for Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe 2014-2016)*. 6(1):1-10.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Mohammad, Firma Sulistyowati, & Andre Purwanugraha Heribertus. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. BPFE: Yogyakarta.
- Majid, Jamaluddin. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa-Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Edisi IV*. BPFE. Yogyakarta.
- Muindro, Renyowijoyo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Munawir. (2011). *Analisis Laporan Keuangan; Edisi Kelima*, Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Pratama, Angga, Iskandar Sam, & Misni Ernawati. (2020). *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Jambi Berdasarkan Konsep Value for Money*. 1(2):130-138.
- Polii, Imanuel RA, David PE Saerang, & Steven J. (2020). *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money*. 1(4):781-788.
- Purwiyanti, Dwi. (2017). *Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value for Money pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi(Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)*. 5(3):190-199.
- Rahayu, Eka Febyanti. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin Tahun 2016-2019*. Skripsi. STIE Indonesia Banjarmasin, Banjarmasin.
- Solihin, Deni. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Value for Money Pada Politeknik TEDC Bandung*, 13(2):102-107.
- Sony, Yuwono. (2005) *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, CV. Bandung.
- Triniyati. (2018). *Analisis Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Dengan Pendekatan Value for Money Periode Tahun 2015-2017*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Wirawati, Putra. (2015), *Penilaian Berbasis Value for Money atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan*, 11(1):252-268.